

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:
SUDIBYO (Editor),
Yoyok ARIESSUSANTO

- I. PERTEMUAN KEPALA PEMERINTAHAN ASEAN DI BRUNEI
- II. SIDANG PARA MENLU ASEAN
- III. KERJASAMA ASEAN
 - A. Kerjasama Energi ASEAN
 - 1. Kerjasama Kelistrikan ASEAN
 - 2. Pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-8
 - 3. Pasar Industri Peralatan Listrik
 - B. Kerjasama Kebudayaan dan Informasi
 - 1. Konperensi Para Redaktur ASEAN
 - 2. Pertukaran Kunjungan Wartawan ASEAN
 - C. Kerjasama Hukum ASEAN
 - 1. Konperensi Mahasiswa Hukum ASEAN (ALSC) ke-1
 - 2. Kerjasama Penegakan Hukum
- IV. MASALAH KEAMANAN
 - A. Stabilitas dan Kemajuan ASEAN
 - B. Masalah Pangkalan Militer AS
 - 1. Kesiediaan Singapura Menampung Fasilitas Militer AS
 - 2. Reaksi dan Komentar
 - a. Sikap Malaysia
 - b. Sikap Muangthai
 - c. Sikap Indonesia
 - d. Sikap Filipina
 - e. Sikap Singapura
 - f. Sikap AS
- V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA-MITRANYA
 - A. Pertemuan ASEAN dengan Mitra Dialognya (PMC)
 - B. Hubungan Perdagangan ASEAN-AS
 - C. Hubungan ASEAN-Kanada
 - 1. Kerjasama Telekomunikasi Angkasa Luar ASEAN-Kanada
 - 2. Peresmian Pusat ASEAN-Kanada
 - D. Hubungan ASEAN-Selandia Baru
 - 1. Kunjungan Misi Perdagangan Selandia Baru ke Indonesia
 - 2. Kunjungan Ali Atlas ke Selandia Baru
 - E. Hubungan ASEAN-Australia
 - 1. Pertemuan Panitia Kerja Kelautan ASEAN-Australia ke-7
 - 2. Masalah Kerjasama Ekonomi Pasifik
 - F. Hubungan ASEAN-Korea Selatan
 - 1. Tawaran Korea Selatan Sebagai Mitra Dialog
 - 2. Pertemuan Komite Kerjasama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan
 - 3. Sistem Kerjasama ASEAN-Korea Selatan
 - G. Hubungan ASEAN-MEE
 - 1. Seminar ASEAN-Eropa
 - 2. Kunjungan Parlemen Eropa ke Indonesia
 - 3. Implikasi Pasar Tunggal Eropa Terhadap ASEAN
 - H. Hubungan ASEAN-Asia Pasifik
 - 1. Posisi ASEAN dalam Percaturan Politik Asia-Pasifik
 - 2. Pertemuan Meja Bundar Asia-Pasifik ke-3
 - 3. Jepang dan Masa Depan Asia Tenggara
- VI. ICK BELUM BERHASIL MENYELESAIKAN KONFLIK KAMBOJA

I. PERTEMUAN KEPALA PEMERINTAHAN ASEAN DI BRUNEI

Dalam rangka kunjungan ke Brunei Darussalam tanggal 2 Agustus 1989 untuk memenuhi undangan Sultan Hassanah Bolkiah guna menghadiri acara khitanan putra pertamanya, para Kepala Pemerintahan negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan tidak resmi. Pertemuan semacam ini sering dilakukan oleh para Kepala Pemerintahan negara anggota ASEAN untuk saling memberikan informasi, tukar-menukar pandangan dan pendapat mengenai berbagai persoalan yang menyangkut hubungan bilateral, regional dan internasional.

Menteri Sekretaris Negara RI, Moerdiono, mengatakan kepada pers di Bandar Seri Begawan tanggal 3 Agustus 1989 bahwa: (1) Presiden Soeharto berturut-turut menerima Presiden Filipina, Corazon Aquino; PM Singapura, Lee Kuan Yew dan PM Malaysia, Mahathir Mohamad, di Istana Darut Taqwa tanggal 2 Agustus 1989, masing-masing berlangsung satu jam; (2) mereka membicarakan prospek perundingan Kamboja yang berlangsung di Paris; (3) penyelesaian perundingan Kamboja di Paris merupakan bagian dari usaha ASEAN melalui JIM I dan JIM II; (4) Presiden Soeharto dan PM Lee Kuan Yew sepakat untuk bertemu kembali di Bali pada akhir tahun 1989; (5) PM Mahathir Mohamad menyatakan keinginannya untuk melihat perkembangan Pulau Batam; (6) Indonesia dan Malaysia sepakat mengembangkan kerjasama untuk menangani tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Masalah itu diharapkan dapat ditangani antar pemerintahan, sehingga jumlah dan pembinaannya dapat dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik; (7) Malaysia dan Indonesia sepakat untuk mengambil langkah-langkah bersama guna mengamankan produk-produk pertanian yang dihasilkan kedua negara; (8) Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengembangkan kerjasama energi nuklir, karena hal ini penting di masa depan; (9) Malaysia dan Indonesia sepakat untuk segera mengadakan pertemuan di Batam (*Suara Pembaruan*, 4 Agustus 1989).

II. SIDANG PARA MENLU ASEAN

Sidang ke-22 para Menlu ASEAN berlangsung di Bandar Seri Begawan tanggal 3-4 Juli 1989. Sidang ini dihadiri oleh Menlu Ali Ajatas (Indonesia), Siddhi Savetsila (Muangthai), Wong Kan Seng (Singapura), Abu

Hasan Omar (Malaysia), Rauf Manglapus (Filipina) dan Mohamed Bolkiah (Brunei Darussalam) selaku pimpinan sidang untuk membahas: (1) merumuskan sikap bersama ASEAN menghadapi Konperensi Internasional tentang Kamboja (ICK); (2) peningkatan kerjasama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik; (3) hubungan dengan Korea Selatan; (4) perbaikan efisiensi dan struktur Sekretariat ASEAN; (5) pengungsi Vietnam; (6) masalah ZOPFAN; (7) bantuan ekonomi untuk Filipina; (8) pemberantasan obat bius; (9) kerjasama dengan mitra dialog; (10) masalah ekonomi dunia dan beberapa masalah politik dunia, seperti perjuangan rakyat Palestina, perang Afghanistan, Afrika Selatan dan pengurangan senjata.

Sidang ini juga dihadiri oleh utusan khusus Sekjen PBB, Rafeudin Ahmed, Ketua Komisi Ad Hoc ICK, Ny. Claude Absa Diallo, serta Dubes Sebulon Kulu mewakili Menlu PNG, Michael Somare (sebagai peninjau).

Sebelum sidang dimulai, suasana telah dihangatkan oleh pertanyaan para wartawan mengenai sikap PM Muangthai, Chatichai Choonhavan, yang telah mengadakan pertemuan dengan PM Hun Sen di Bangkok awal tahun 1989 ini. Menjawab masalah ini, Menlu Siddhi Savetsila mengatakan kepada para wartawan di Bandar Seri Begawan tanggal 2 Juli 1989 bahwa berlangsungnya pembicaraan antara PM Chatichai Choonhavan dengan PM Hun Sen tidak berarti bahwa Muangthai mengakui pemerintahan Kamboja di bawah pimpinan Hun Sen, hanya mendengarkan secara tidak resmi. Di samping itu, Muangthai tetap menolak usul agar kursi CGDK di PBB dikosongkan, karena pengosongan itu berarti kekalahan. Tetapi apabila pemerintah Hun Sen menyetujui pemerintah sementara rujukan nasional, maka pemerintah sementara itu akan segera menggantikan CGDK. Sementara itu sehubungan dengan bantuan senjata kepada faksi-faksi yang bertikai, Menlu Siddhi Savetsila juga menegaskan bahwa sebelum tercapai gencatan senjata, penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan terlaksananya mekanisme pengawasan internasional, siapa saja dapat terus memberi bantuan kepada faksi-faksi Kamboja yang bertikai (*Antara*, 3 Juli 1989).

Berkaitan dengan hal itu, setibanya di Bandar Seri Begawan tanggal 2 Juli 1989, Menlu Singapura, Wong Kan Seng, mengatakan bahwa negaranya dan negarane-negara ASEAN yang lain merasa prihatin dengan meluasnya kontak hubungan antara Muangthai dan pemerintah Hun Sen. Pemerintah Hun Sen sebaiknya tidak

dipandang sebagai pemerintah yang sah. Meskipun hubungan Bangkok-Phnom Penh meluas, ASEAN tetap konsekuen dengan tujuan yang telah dinyatakan untuk menolak keabsahan pemerintah Hun Sen. Di samping itu, ASEAN tetap menghendaki tercapainya penyelesaian politik di Kamboja secara menyeluruh (*An-tara*, 3 Juli 1989).

Sementara itu, Menlu Ali Alatas mengatakan di Bandar Seri Begawan tanggal 2 Juli 1989 bahwa Indonesia mengharapkan Pangeran Norodom Sihanouk untuk tetap hadir dalam ICK. Penegasan Menlu Ali Alatas ini dilontarkan sehubungan dengan munculnya pernyataan Pangeran Norodom Sihanouk untuk memboikot ICK jika tiga syarat yang dituntutnya tidak dipenuhi. Tiga syarat itu adalah: (1) agar dunia internasional mengecam Vietnam sebagai agresor; (2) tidak diikutsertakannya negara-negara blok Soviet dalam pasukan pengawas perdamaian itu (*Kompas*, 3 Juli 1989). Sikap Norodom Sihanouk ini tampaknya juga tidak disetujui oleh Menlu Siddhi Savetsila.

Menlu Singapura, Malaysia dan Filipina mendukung Indonesia duduk bersama Perancis menentuai ICK.

Komunike bersama pada akhir sidang menyebutkan bahwa: (1) Vietnam dan kelompok-kelompok yang bertikai di Kamboja agar lebih luwes dan akomodatif untuk segera mencapai suatu penyelesaian politik di Kamboja secara menyeluruh; (2) pertemuan antara Pangeran Norodom Sihanouk dan PM Hun Sen di Paris, 24 Juli 1989, merupakan hal yang penting untuk membuka jalan menuju kerukunan nasional di Kamboja; (3) ASEAN menghargai usaha Indonesia yang telah menjadi tuan rumah JIM I dan JIM II, dan ICK harus merupakan upaya pelengkap atas prakarsa ASEAN selama 10 tahun ini; (4) ASEAN menghargai usaha Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar yang telah membantu usahanya menyelesaikan masalah Kamboja; (5) ASEAN menghargai prakarsa Perancis untuk mengadakan konferensi internasional mengenai Kamboja (ICK), guna mencapai penyelesaian politik secara menyeluruh di Kamboja; (6) penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja pada akhir September 1989 merupakan suatu usaha yang positif tetapi harus tetap berkaitan dengan penyelesaian politik di Kamboja secara menyeluruh, baik aspek internal maupun aspek eksternal; (7) perlu dibentuk suatu mekanisme pengawasan internasional di bawah naungan PBB (*Kompas*, 5 Juli 1989); (8) Vietnam harus bertanggung jawab atas pengungsi yang berasal dari negaranya serta harus bersedia mene-

rima kembali para pengungsi yang dikategorikan bukan pengungsi dan tidak dapat dikirim ke negara ketiga; (9) tercapainya penyelesaian masalah pengungsi secara langgeng memerlukan langkah-langkah efektif dan bijaksana dari Vietnam. Penyelesaian masalah pengungsi akan langsung mendorong tercapainya stabilitas, kerjasama dan saling pengertian antara Vietnam dan ASEAN; (10) ASEAN menyambut baik kesimpulan konferensi internasional mengenai pengungsi di Jenewa tanggal 13-14 Juni 1989; (11) pemukiman kembali kaum pengungsi di kamp-kamp ASEAN dengan segera, pengurangan arus pencari suaka secara nyata dan penanganan secara aktif para pengungsi yang tidak memenuhi syarat untuk dimukimkan kembali merupakan bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah pengungsi Indocina secara langgeng; (12) para pejabat senior ASEAN agar mempertimbangkan konsep Zone Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ) sebagai bagian dari ZOPFAN; (13) ASEAN akan menjalin hubungan dialog sektoral dengan Korea Selatan, yang pada awal-awalnya akan memusatkan perhatian pada perdagangan, penanaman modal dan pariwisata; (14) ASEAN menyambut baik pembicaraan para negara maju di Tokyo dewasa ini untuk memberi bantuan ekonomi kepada Filipina; (15) kerjasama penanggulangan pelanggaran obat bius akan ditingkatkan, antara lain melalui pendidikan preventif, pengobatan, rehabilitasi pecandu obat bius dan penanggulangan penyelundupan obat bius; (16) ASEAN merasa prihatin dengan meluasnya penyakit AIDs, yang merupakan ancaman besar bagi kesejahteraan masyarakat dunia; (17) ASEAN merasa puas atas kelangsungan kerjasama dengan mitra-mitra dialog; (18) kerjasama komoditi dengan Australia agar ditingkatkan untuk mempermudah komoditi-komoditi ASEAN masuk pasar Australia; (19) hubungan ASEAN-Kanada dalam bidang perdagangan dan investasi perlu diperbaiki lebih lanjut; (20) ASEAN merasa prihatin atas kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh persetujuan AS-MEE mengenai subsidi pertanian dan kampanye anti kayu tropis di negara-negara maju. ASEAN mengharapkan fasilitas keuangan MEE yang baru akan mendorong minat Eropa Barat untuk mengadakan kerjasama industri di negara-negara ASEAN; (21) ASEAN merasa prihatin atas kebijaksanaan graduasi Selandia Baru yang telah mempengaruhi negara-negara ASEAN. Diharapkan Selandia Baru bersedia menanggapi permintaan ASEAN mengenai rencana GSP-nya; (22) AS agar berperan secara aktif dalam perundingan perdagangan multilateral di Uruguay (*Uruguay Round*). Di samping itu, ASEAN juga mendesak agar pengaruh-pengaruh buruk dari perang subsidi-

di pertanian dan kampanye anti minyak nabati diakhiri secara baik; (23) ASEAN merasa prihatin atas berlangsungnya saling ketergantungan asimetris yang berlanjut antara negara-negara berkembang dan negara maju, serta pengaruh-pengaruh yang merugikan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi makro beberapa negara maju atas negara-negara berkembang; (24) defisit anggaran dan perdagangan AS terus mengancam stabilitas ekonomi internasional, sebagaimana halnya dengan perubahan nilai tukar mata-mata uang penting; (25) ASEAN akan mengambil bagian secara konstruktif dalam perundingan perdagangan internasional; (26) untuk memecahkan masalah-masalah perdagangan, negara-negara anggota ASEAN jangan mengambil langkah-langkah bilateral; (27) kreditor-kreditor resmi agar mempertimbangkan pengurangan beban hutang bagi negara-negara yang banyak hutangnya; (28) ASEAN merasa prihatin atas peningkatan perlombaan senjata di seluruh dunia; (29) negara-negara adikuasa agar mulai mengadakan perundingan untuk menghapuskan kekuatan nuklir jarak dekat dan melanjutkan usaha-usaha menuju pakta pelarangan uji-coba nuklir secara menyeluruh; (30) ASEAN mendukung perjuangan sah rakyat Palestina; (31) Iran dan Irak agar mematuhi syarat-syarat persetujuan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik mereka; (32) ASEAN menyambut baik penarikan total pasukan Uni Soviet dari Afghanistan; (33) untuk memungkinkan para pengungsi Afghanistan kembali secara selamat ke kampung halamannya, diperlukan penyelesaian politik secara menyeluruh di Afghanistan; (34) sanksi ekonomi dan sanksi-sanksi lain atas Afrika Selatan mempunyai dampak yang berarti, oleh sebab itu perlu diperhebat, diperketat dan diperluas; (35) ASEAN memperhatikan perkembangan dan kecenderungan baru di kawasan Asia-Pasifik, khususnya mengenai usul-usul dari negara-negara mitra dialognya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi; (36) sidang ke-23 para Menlu ASEAN tahun 1990 akan berlangsung di Jakarta (*Antara*, 4 Juli 1989); (37) struktur organisasi Sekretariat ASEAN disempurnakan dengan pembentukan suatu Deputi Sekjen ASEAN. Wakil Singapura akan menjadi deputi yang pertama selama 3 tahun sejak pertengahan 1990 (*Kompas*, 5 Juli 1989).

Sesuai sidang para Menlu ASEAN itu, Menlu Ali Alatas menegaskan bahwa: (1) setelah masalah Kamboja selesai ASEAN tidak akan bubar, justru sebaliknya akan memainkan peranan yang lebih besar, terutama di bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara; (2) pandangan Indonesia mengenai faktor pemersatu ASEAN sangat

berbeda dengan pandangan para analis Barat; (3) sejak semula Indonesia menganggap bahwa faktor-faktor yang mendekatkan ASEAN bukan disebabkan oleh suatu persepsi mengenai ancaman dari luar atau suatu masalah politik tertentu. Faktor yang mendekatkan ASEAN adalah sejumlah kepentingan dan persepsi bersama untuk memajukan pembangunan, kesejahteraan rakyat maupun keamanan dalam arti luas, bukan militer semata. Kepentingan bersama itu akan tetap menjadi faktor pemersatu.

Penegasan Menlu Ali Alatas ini dilontarkan sehubungan dengan munculnya pendapat analis-analis Barat, yang mengatakan bahwa faktor pemersatu ASEAN bukan masalah kepentingan ekonomi, tetapi munculnya perasaan takut atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik Kamboja dan keberanian Vietnam untuk melakukan agresi ke negara-negara tetangganya. Oleh sebab itu tercapainya penyelesaian konflik Kamboja, memaksa ASEAN untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan perekat baru (*Antara*, 5 Juli 1989).

Sementara itu masalah rencana pembentukan forum Asia-Pasifik cukup pula mendapat perhatian, dan tampaknya ASEAN juga tidak memperlihatkan dukungan yang penuh atas pembentukan forum itu. ASEAN berpendapat bahwa lebih baik memanfaatkan wadah yang sudah ada daripada harus membangun forum yang baru. Dalam kaitan ini Menlu Ali Alatas secara diplomatik mengatakan bahwa Indonesia seperti negara-negara anggota ASEAN lainnya menganggap usul PM Bob Hawke itu relevan, tetapi sebaiknya jangan membentuk suatu badan baru untuk mewujudkan kerjasama, lebih baik sepenuhnya memanfaatkan mekanisme yang telah ada seperti ASEAN di Asia Tenggara (*Kompas*, 5 Juli 1989).

Kalangan diplomat di Asia, sebagaimana dikutip oleh *The Asian Wall Street Journal* tanggal 4 Juli 1989, menyatakan antara lain bahwa: (1) usul pembentukan forum Asia-Pasifik dapat mengganggu hubungan baik antara negara-negara ASEAN dan negara-negara yang disebut-sebut akan menjadi anggota forum itu. Hal ini disebabkan oleh sikap ASEAN yang mungkin melihat rencana pembentukan forum itu pada dasarnya merupakan prakarsa negara kaya, seperti AS, Jepang dan Australia, yang ingin menyeret mereka bergabung ke dalam forum baru itu; (2) kehadiran forum baru itu juga dapat menggeser pengaruh ASEAN yang telah banyak berperanan selama ini; (3) sementara itu beberapa negara calon anggota forum itu juga merasa

cemas, karena pembentukan forum itu dapat dianggap sebagai benih pembentukan sebuah kartel oleh organisasi-organisasi perdagangan yang telah ada seperti MEE (*Kompas*, 5 Juli 1989).

III. KERJASAMA ASEAN

A. KERJASAMA ENERGI ASEAN

1. Kerjasama Kelistrikan ASEAN

Pertemuan Pimpinan Perusahaan Listrik ASEAN ke-6 berlangsung di Jakarta tanggal 7-8 Juni 1989 untuk membahas: (1) pelaksanaan intern-koneksi jaringan listrik ASEAN, khususnya di antara negara terdekat, seperti Indonesia-Malaysia, Singapura-Thailand; (2) kemajuan pelaksanaan 9 proyek kerjasama dan tiga studi intensif yang sudah berjalan beberapa tahun lalu.

Direktur Utama Perum Listrik Negara (PLN) Ermansyah Yamin mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) kerjasama kelistrikan ASEAN yang sudah digalang beberapa tahun lalu di antaranya bidang manajemen, komputerisasi, pengembangan mikro hidro dan penelitian, pengembangan enjineri; (2) kerjasama ini mencerminkan itikad baik masing-masing negara untuk maju bersama; (3) di antara negara anggota ASEAN sendiri terdapat beberapa keahlian yang dapat saling mengisi, khususnya di bidang pengoperasian jenis pembangkit; (4) bila pengamalan masing-masing negara anggota ASEAN itu dapat di-himpun, akan merupakan kekuatan besar; (5) keahlian di masing-masing negara ASEAN dapat saling ditukar, sehingga biaya untuk menimba pengalaman ke negara maju dapat ditekan sesuai dengan prinsip ASEAN; (6) dalam Pelita V PLN bertekad memacu perkembangan geothermal di Kamojang, Gunung Salak, Dieng dan Lathendong (Sulawesi Utara), karena dianggap potensial dan mampu menghasilkan tenaga ribuan mega watt (MW); (7) tenaga ahli geothermal Indonesia belum banyak dan untuk mengatasi hal ini akan dikirimkan beberapa personilnya ke Filipina untuk mempelajari mekanisme dan operasional sebuah geothermal; (8) untuk mempersiapkan tenaga ahli proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Indonesia mengirim personilnya ke Malaysia dan Muangthai untuk memperdalam dan mempelajari pengetahuan tentang hal itu (*Merdeka*, 7 Juni 1989).

Sementara itu Pimpinan Perusahaan Listrik Malaysia, Dato Mohammad Jalaludin bin Zainudin, menga-

takan: (1) selain panas bumi dan sumber tenaga air, di kawasan ASEAN terdapat sumber energi potensial yang belum dikembangkan secara maksimal; (2) karena pertumbuhan kebutuhan energi listrik yang pesat, khususnya untuk kebutuhan industri dan rumah tangga sebagai realisasi peningkatan taraf hidup masyarakat di negara-negara ASEAN, setelah tahun 2000 ASEAN mungkin menggunakan energi nuklir; (3) penggunaan energi nuklir memerlukan pengkajian yang matang dan teliti, khususnya dilihat dari segi keselamatan rakyat; (4) penggunaan energi nuklir di Malaysia telah lama dipikirkan, tetapi hingga kini belum direalisasikan karena persediaan energi sumber daya alam belum cukup tersedia (*Merdeka*, 8 Juni 1989).

Pimpinan Perusahaan Listrik Muangthai, Paopat Javanalikoan, mengatakan: (1) penelitian energi nuklir di negaranya telah dilakukan sejak 20 tahun lalu dan hingga saat ini masih dianggap rawan untuk dikembangkan; (2) penggunaan energi nuklir risikonya terlalu tinggi, terutama terhadap lingkungan.

Kepala Perusahaan Listrik Filipina, Ernesto M. Abolitz, mengatakan bahwa: (1) penggunaan energi panas bumi di ASEAN merupakan salah satu alternatif yang sangat efisien; (2) penggunaan panas bumi di Filipina saat ini mencapai 850 MW atau 21% dari total sumber energi yang ada dan dua tahun mendatang akan ditingkatkan menjadi 38% (*Merdeka*, 8 Juni 1989).

Para Dirut Perusahaan Listrik ASEAN menyatakan bahwa: (1) belum saatnya ASEAN menggunakan tenaga nuklir sebagai sumber pembangkit listrik (PLTN) pada tahun 2000, karena pada tahun itu ASEAN masih memiliki sumber pembangkit listrik lainnya; (2) suatu jaringan listrik ASEAN perlu dibangun sebagai tindak lanjut pengembangan kerjasama kelistrikan yang dewasa ini baru sampai tahap bilateral (*Antara*, 8 Juni 1989).

Seusai pertemuan, Dirut PLN Ermansyah Yamin mengatakan kepada pers; (1) tingkat kesusutan listrik di Indonesia dan Filipina menempati tingkat terbawah, sekitar 19%, sedangkan Singapura menempati tingkat tertinggi hanya 4%; (2) Singapura memiliki jaringan listrik terpendek di antara negara ASEAN lainnya, dan risiko susutnya paling kecil. Sebaliknya Indonesia dan Filipina memiliki jaringan terpanjang dan terbesar, oleh sebab itu risiko susutnya sangat tinggi; (3) masalah-masalah yang ada akan dibahas dan dimatangkan lagi pada pertemuan para Menteri Ekonomi dan para pejabat senior ASEAN di Kuala Lumpur, di antaranya tiga studi intensif yakni: (a) konsep pembangunan,

pengoperasian dan pengalihan guna membiayai pembangkit tenaga listrik; (b) konsep standardisasi pembangkit tenaga panas bumi ukuran kecil; (c) konsep pembangkit listrik putaran kombinasi (*Antara*, 8 Juni 1989).

2. Pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-8

Pertemuan para Menteri Energi ASEAN ke-8 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 22 Juni 1989 dihadiri oleh 70 peserta, termasuk 16 pejabat Malaysia, untuk membahas: (1) kemajuan proyek-proyek energi di kawasan ASEAN; (2) standardisasi peralatan listrik sehingga dapat digunakan oleh semua anggota ASEAN; (3) pengembangan mini hidro dan mikro hidro, pelatihan dan penelitian pengembangan energi; (4) kemungkinan pemasangan kabel transmisi Brunei-Sabah dan Serawak, dua negara bagian Malaysia Timur, dan Malaysia-Indonesia serta Malaysia-Muangthai maupun Malaysia-Singapura.

Pertemuan itu didahului dengan pertemuan para pejabat tinggi Departemen Energi ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 19-20 Juni 1989, dipimpin oleh Sekjen Departemen Energi, Pos dan Telekomunikasi Malaysia, Dr. Othman Yeop Abdullah, untuk membahas: (1) agenda sidang para Menteri Energi ASEAN ke-8; (2) pengembangan mini hidro dan mikro hidro, pelatihan, standardisasi serta penelitian dan pengembangan energi; (3) kembali proyek-proyek yang sedang dibangun dan kemungkinan menggalang kerjasama di bidang-bidang baru; (4) pencarian sumber dana tambahan bagi pusat riset, manajemen dan pelatihan energi ASEAN-MEE yang dibentuk di Jakarta, November 1988 (*Antara*, 20 Juni 1989).

Para Menteri Energi ASEAN sepakat untuk: (1) melaksanakan program aksi persetujuan keamanan bahan bakar minyak ASEAN (ASPA atau *ASEAN Petroleum Security Agreement*); (2) menerima syarat baru yang akan mendukung kegiatan kelompok ahli batu bara ASEAN yang mencakup: (a) peningkatan kerjasama dengan Negara-negara Ketiga; (b) penggalakan hubungan antara kelompok ahli dan sektor swasta; (3) menanggapi rencana aksi aplikasi komersial dari teknologi di kawasan ASEAN di bidang sumber energi baru dan yang dapat diperbarui. Di samping itu, negara-negara ASEAN non-OPEC mengharapkan agar kestabilan harga minyak OPEC dapat tetap terjamin (*Antara*, 24 Juni 1989).

3. Pasar Industri Peralatan Listrik

Dirjen Listrik dan Energi Baru Indonesia, Aris-munandar, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 29 Juli 1989 bahwa: (1) kerjasama perusahaan listrik ASEAN merupakan salah satu pasar yang potensial bagi industri peralatan listrik Indonesia; (2) dengan memanfaatkan kerjasama perusahaan listrik ASEAN, hasil industri peralatan listrik Indonesia yang bermutu tinggi harus dapat merebut pasaran ASEAN; (3) transformator merupakan salah satu industri peralatan listrik Indonesia yang dapat berperan sebagai komoditi ekspor non-migas, terutama untuk melayani kebutuhan perusahaan listrik di ASEAN (*Merdeka*, 31 Juli 1989).

B. KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

1. Konperensi Para Redaktur ASEAN

Konperensi Para Redaktur ASEAN ke-4 berlangsung di Pulau Langkawi, Malaysia, tanggal 14-18 Agustus 1989, dihadiri oleh 70 orang yang terdiri dari para redaktur dan ahli di berbagai bidang untuk membahas: (1) pertukaran berita ASEAN; (2) perluasan peliputan media ASEAN; (3) promosi pariwisata ASEAN melalui media; (4) latihan kewartawanan ASEAN (*Suara Pembaruan*, 12 Agustus 1989).

Sambutan tertulis Menteri Penerangan Malaysia, Mohamed Rahmat, pada pembukaan pertemuan itu sebagai berikut: (1) ia menantang kantor-kantor berita ASEAN untuk menyajikan laporan-laporan yang luas, tepat pada waktunya dan baik mengenai pembangunan yang berlangsung di negara-negara ASEAN; (2) kantor-kantor berita ASEAN agar menyediakan berita-berita yang dibutuhkan pelanggan, seperti surat kabar dan media elektronik; (3) laporan-laporan agar mencakup profil para tokoh utama politik dan usaha di wilayah ASEAN; (4) laporan agar lebih banyak berupa liputan film, buku, kesusastraan dan kebudayaan; (5) hanya dengan mengambil satu langkah yang lebih berani, media itu dapat memainkan peranan penting dalam pemupukan hubungan yang lebih erat mengenai basis antar bangsa di wilayah ASEAN; (6) komite kebudayaan dan informasi ASEAN (COCI) yang merupakan mekanisme kelompok itu harus lebih meningkatkan hubungan dua bidang yang ditanganinya, sedangkan para profesional di bidang media hendaknya membantu meningkatkan hubungan pada tingkat yang mendasar; (7) COCI agar memperluas liputan kegiatan-kegiatan seni,

musik dan informasi yang memungkinkan kehidupan sehari-hari penduduk kawasan ASEAN dapat dilaporkan secara meluas dalam pers ASEAN; (8) media mempunyai peranan dalam pemeliharaan stabilitas politik, percepatan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, peningkatan kesatuan regional dan mempertinggi pengembangan sumber daya manusia (*Antara*, 15 Agustus 1989); (9) banyak sukses yang diraih ASEAN selama ini disebabkan oleh peranan positif dan aktif medianya, terutama dalam hal pengakuan dunia tentang stabilitas dan dinamika ASEAN; (10) redaktur maupun wartawan adalah pembuat kejadian, karenanya agar membuat liputan-liputan ASEAN yang berguna bagi dunia; (11) kecuali Brunei dan Singapura, kantor-kantor berita ASEAN selama ini sudah menjalin kerjasama pertukaran berita dalam ANEX (*ASEAN News Agency Exchanges*) (*Saara Pembaruan*, 18 Agustus 1989).

Hasil pertemuan itu antara lain: (1) Singapura dan Brunei Darussalam yang belum mempunyai kantor berita sendiri bersedia untuk ikut serta dalam pertukaran berita ASEAN; (2) kedua negara itu akan menunjuk organisasi pers di negaranya untuk melakukan pertukaran berita. Di samping itu hasil-hasil lainnya yang berupa rekomendasi dan resolusi adalah sebagai berikut: (1) mengusulkan agar kantor-kantor berita ASEAN menyetujui strategi bersama membentuk suatu kader wartawan yang mahir dalam berbahasa Inggris untuk menangani berita-berita ASEAN; (2) mengusulkan agar lebih banyak laporan-laporan analisa dan latar-belakang, karangan khas dan artikel-artikel mengenai ekonomi dikirimkan melalui ANEX; (3) menganjurkan semua media ASEAN melakukan koordinasi dan pendekatan terintegrasi dalam bidang pendidikan dan latihan, untuk menghasilkan wartawan yang sadar akan kepentingan dan kebutuhan nasional maupun regional; (4) menyerukan pembentukan laboratorium jurnalistik untuk mendidik para wartawan ASEAN dalam penulisan berita; (5) mengusulkan agar dibentuk suatu komisi untuk menjajaki kemungkinan pembiayaan penerbitan buku-buku mengenai penulisan berita dan buku-buku referensi; (6) mengusulkan agar dilakukan pertukaran kunjungan penulis pariwisata sebelum *Visit ASEAN Year 1992*; (7) mendesak kantor-kantor berita ASEAN membuat suatu kesepakatan untuk mengangkat ataupun mengutip berita atau artikel surat kabar, khusus mengenai berbagai masalah untuk memenuhi kepentingan para pemakai akhir; (8) sepakat untuk menyelenggarakan konferensi Redaktur ASEAN ke-5 di Muangthai tahun 1991 (*Suara Pembaruan*, 19 Agustus 1989).

2. *Pertukaran Kunjungan Wartawan ASEAN*

Ketika menerima kunjungan wartawan dari Muangthai, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina, tanggal 15 Agustus 1989, Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika Indonesia, Dr. Janner Sinaga, mengatakan: (1) pertukaran kunjungan wartawan antar negara anggota ASEAN perlu ditingkatkan; (2) kerjasama ASEAN, khususnya di bidang pers, baik media cetak maupun elektronika, sangat penting untuk meningkatkan pertukaran kunjungan wartawan ASEAN; (3) kerjasama pers ASEAN penting untuk memperkokoh dan meningkatkan pengetahuan masyarakat kawasan ini tentang proses dan kemajuan pembangunan di negara-negara anggota ASEAN; (4) para wartawan itu diharapkan dapat menulis di media mereka tentang pelaksanaan pembangunan dan berbagai perkembangan yang dilihat di Indonesia (*Antara*, 16 Agustus 1989).

C. KERJASAMA HUKUM ASEAN

1. *Konperensi Mahasiswa Hukum ASEAN (ALSC) ke-1*

Konperensi Mahasiswa Hukum ASEAN (*ASEAN Law Students Conference* atau ALSC) yang dihadiri oleh delegasi Mahasiswa Malaysia (5 orang), Indonesia (5 orang), Singapura (5 orang) dan Filipina serta Muangthai (masing-masing 2 orang), ke-1 berlangsung di Jakarta tanggal 15-20 Mei 1989, untuk: (1) meningkatkan kerjasama hukum melalui sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan serta pengembangan pendidikan hukum di negara-negara ASEAN; (2) memilih pengurus dan menetapkan pelaksanaan pertemuan rutin organisasi.

Brunei tidak mengirimkan delegasinya karena belum ada fakultas hukum di negara itu.

Hasil konferensi antara lain: (1) mengangkat Ketua Ikatan Mahasiswa Hukum Indonesia, Firos Gafar, sebagai Sekjen ALSC periode 1989-1991; (2) menetapkan pertemuan organisasi ini setiap dua tahun sekali dan pertemuan ke-2 akan diselenggarakan di Kuala Lumpur tahun 1991; (3) sepakat untuk meningkatkan kerjasama hukum secara bilateral, karena masih ada perbedaan hukum di setiap negara anggota; (4) sepakat mengadakan pertukaran mahasiswa hukum antar negara-negara anggota ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 22 Mei 1989).

2. Kerjasama Penegakan Hukum

Jaksa Agung Indonesia, Soekarton Marmosoedjono SH, mengatakan kepada *Antara* di Kuala Lumpur tanggal 1 Juli 1989 bahwa: (1) para Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman negara anggota ASEAN sepakat untuk mengadakan kerjasama penegakan hukum, walaupun terdapat perbedaan dalam sistem hukumnya; (2) mereka menyarankan agar diselenggarakan konperensi para Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman se-ASEAN ke-1 (kemungkinan akan diadakan di Jakarta, tahun 1990). Konperensi itu akan didahului oleh pertemuan para pejabat tinggi Kementerian Kehakiman dan Kejaksaan Agung untuk mempersiapkan materi pembicaraan; (3) masalah spesifik tentang inventarisasi istilah hukum yang mungkin dapat dicocokkan antara Indonesia, Malaysia dan Brunei yang menggunakan bahasa Melayu akan dibicarakan dalam pertemuan itu, hal ini diperlukan untuk menghindari salah tafsir, misalnya hukuman seumur hidup di Malaysia hanya sampai 20 tahun sedangkan di Indonesia benar-benar dilaksanakan sampai mati; (4) Jaksa Agung Brunei dan Jaksa Agung serta Menteri Kehakiman Malaysia sepakat untuk mencocokkan istilah-istilah hukum kedua negara; (6) Indonesia, Brunei dan Malaysia dapat mengadakan kerjasama dalam peristilahan hukum; (7) pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara negara-negara ASEAN tidak menemui kesulitan dan berjalan lancar; (8) Indonesia sudah mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Muangthai dan Filipina, sementara itu dengan Brunei Darussalam dan Singapura belum ada; (9) meskipun belum ada perjanjian ekstradisi dengan kedua negara itu, bukan berarti menutup kemungkinan untuk melakukan kerjasama di bidang ini; (10) Jaksa Agung Singapura menyatakan bersedia membantu menangkap penyelundup atau buron dari Indonesia yang berada di negaranya dengan cara menyatakan mereka sebagai pendatang haram; (11) Indonesia baru mengadakan tukar-menukar pengalaman di bidang pendidikan hukum dengan Muangthai melalui perjanjian yang konkrit, dan pada bulan Juli 1989 Muangthai akan mengirim 4 orang jaksa untuk mengikuti pendidikan jaksa anti korupsi di Jakarta; (12) tindakan keras Pemerintah Indonesia terhadap tindak pidana ekonomi seperti penyelundupan, korupsi, asuransi dan perbankan telah terdengar di dunia internasional; (13) Indonesia mendapat pengakuan internasional dalam pelaksanaan penegakan hukum secara konsekuen untuk melindungi kepentingan rakyat, hal ini terbukti dengan banyaknya undangan untuk mengikuti konperensi internasional tentang tindak pidana ekonomi; (14) kerjasama dan penegakan hukum

secara internasional sangat dibutuhkan, terutama untuk menanggulangi kejahatan perbankan, maritim, penyelundupan, narkoba dan kejahatan ekonomi lainnya (*Angkatan Bersenjata*, 14 Juli 1989).

IV. MASALAH KEAMANAN

A. STABILITAS DAN KEMAJUAN ASEAN

PM Singapura, Lee Kuan Yew, mengatakan dalam pidato tahunan Hari Nasional Singapura tanggal 20 Agustus 1989 bahwa: (1) Presiden Soeharto merupakan faktor paling penting yang menentukan stabilitas dan kemajuan di seluruh kawasan ASEAN; (2) Presiden Indonesia mendatang harus seperti Presiden Soeharto terutama dalam prinsip-prinsip dasar dan kebijaksanaan, yang semua ini akan membuat ASEAN tumbuh pesat, makmur dan damai; (3) Presiden Soeharto merupakan seorang pemimpin yang mempunyai sikap dan sifat yang menekankan pembangunan ekonomi dan mendorong hubungan kerjasama dengan menciptakan saling percaya, sehingga ASEAN menarik para investor dan pemerintah di luar kawasan ini; (4) jika pengganti Soeharto nanti seorang yang sama dalam prinsip dasar dan kebijaksanaan, ASEAN akan tumbuh, makmur dan damai dan tidak hanya sekedar ZOPFAN; (5) Presiden Soeharto menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan sejumlah upaya untuk melembagakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya. ASEAN akan tumbuh dan menjadi makmur jika semua upaya ini terjamin sebelum Presiden Soeharto mengundurkan diri; (6) Presiden Soeharto tidak memperlihatkan keprihatinannya ketika dia mengemukakan rencana Singapura menyediakan fasilitas militer bagi AS dalam pertemuan di Brunei Darussalam tanggal 2 Agustus 1989; (7) ia tidak pernah melihat Presiden Soeharto bimbang dan selalu menunjukkan posisinya (*Kompas*, 22 Agustus 1989).

B. MASALAH PANGKALAN MILITER AS

1. Kesiediaan Singapura Menampung Fasilitas Militer AS

Menteri Negara Urusan Luar Negeri Singapura, Brigjen George Yeo, mengatakan kepada Parlemen tanggal 4 Agustus 1989 bahwa: (1) negaranya bersedia menampung fasilitas-fasilitas AS untuk mempermudah Filipina mempertahankan pangkalan-pangkalan militer AS; (2) Filipina menginginkan agar negara-negara ang-

gota ASEAN lainnya menampung fasilitas-fasilitas militer AS; (3) setiap peningkatan kehadiran militer AS di Singapura akan mendorong stabilitas regional dan bukan untuk meningkatkan permusuhan antara negara-negara adikuasa; (4) kunjungan tim survei AS ke Singapura pada bulan Juni 1989 untuk mempelajari fasilitas AL dan AU serta menentukan sesuatu yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh militer AS. Hasil survei itu menunjukkan, Singapura mungkin tidak dapat memberikan ruang dan lokasi strategis bagi kompleks pangkalan angkatan udara dan laut AS; (5) kunjungan itu pun hanya bersifat penjajakan dan tidak menyiratkan komitmen kedua pihak atas penempatan pangkalan AS di Singapura. Selain itu juga tidak mengurangi keterikatan negaranya pada pengaturan pertahanan lima negara dan Singapura tetap konsisten dengan prinsip-prinsip gerakan nonblok; (6) negaranya mendukung tujuan ASEAN untuk menciptakan kawasan damai, bebas dan netral (ZOPFAN) dalam jangka panjang; (7) untuk mencapai tujuan ZOPFAN, suatu kehadiran AS yang berkesinambungan di Asia Tenggara diperlukan. Hal ini juga perlu untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan (*Antara*, 5 Agustus 1989).

2. Reaksi dan Komentar

Menanggapi tawaran Singapura itu, setidak-tidaknya ada dua sikap utama, yakni menolak dan menyetujui. Malaysia tampaknya cenderung untuk menolak gagasan Singapura itu, apabila Singapura akan dijadikan pangkalan militer AS. Sebaliknya Muangthai cenderung untuk menyetujuinya. Sementara itu, Indonesia masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Secara rinci sikap-sikap itu tergambar dalam pernyataan berikut ini:

a. Sikap Malaysia

Menteri Pertahanan Malaysia, Tengku Ahmad Rithauden, mengatakan kepada *The Straits Time* tanggal 6 Agustus 1989 bahwa: (1) negaranya akan tetap setia dengan prinsip ZOPFAN dan mengharapkan anggota-anggota ASEAN lainnya tetap setia dengan komitmen itu; (2) proses menuju ZOPFAN harus sejalan dengan proses berakhirnya pangkalan-pangkalan militer asing di kawasan ini; (3) Menlu Singapura, Wong Kan Seng, telah memberitahu Menlu Malaysia, Abu Hasan Omar, tentang tawaran itu ketika berkunjung ke Kuala Lumpur, Juli 1989 (*Pelita*, 8 Agustus 1989).

Sekjen Deplu Malaysia, Kamil Jaafar, juga mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 8 Agustus 1989 bahwa: (1) Malaysia menentang setiap kehadiran militer AS di Singapura, karena selain bertentangan dengan upaya peredaan Timur-Barat, juga bertentangan dengan prinsip ZOPFAN; (2) Malaysia tidak melihat alasan untuk memperkenankan suatu pangkalan militer lain setelah di Filipina dan di Vietnam (*Suara Pembauran*, 9 Agustus 1989).

Deputy Menlu Malaysia, dr. Abdullah Fadzil Che Wan, mengatakan kepada pers di Ipoh, tanggal 9 Agustus 1989 bahwa: (1) anggota-anggota ASEAN agar menyatakan pendiriannya atas keinginan Singapura itu; (2) negaranya telah memperingatkan implikasi-implikasi yang mungkin timbul; (3) sejauh ini Singapura belum memberikan tanggapan atas pendirian Malaysia; (4) keinginan Singapura itu akan mengganggu konsep ZOPFAN dan cita-cita ASEAN untuk membebaskan senjata nuklir dari kawasan ini seperti yang dinyatakan oleh KTT ASEAN di Manila 1987 (*Antara*, 11 Agustus 1989).

PM Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan kepada *Washington Post* di Washington tanggal 8 Agustus 1989 bahwa: (1) belum waktunya bagi AS untuk menarik diri dari wilayah Asia Tenggara meskipun ketegangan wilayah tampaknya mulai mereda sebagai akibat dari usaha-usaha perdamaian Uni Soviet serta prospek penyelesaian Kamboja; (2) pengurangan apa pun dari kehadiran militer AS agar dilakukan sejalan dengan langkah-langkah tertentu Uni Soviet, seperti penarikan pasukan Soviet dari Cam Ranh di Vietnam; (3) sekarang belum saatnya membicarakan pengosongan pangkalan-pangkalan AS dari Filipina; (4) Malaysia berkeberatan bila tujuan Singapura itu untuk menempatkan pasukan AS di negara itu. Malaysia tidak senang melihat pesawat-pesawat AS berpangkalan di Singapura atau sebagian Singapura berubah menjadi pangkalan angkatan laut AS. Tetapi negaranya tidak keberatan jika Singapura menyediakan fasilitas untuk perbaikan dan pelayanan lain bagi pasukan AS (*Antara*, 14 Agustus 1989).

Menlu Malaysia, Abu Hassan Omar, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 12 Agustus 1989 bahwa: (1) ASEAN seharusnya bertemu untuk membicarakan kemungkinan kehadiran pangkalan AS di Singapura. Pertemuan itu wajar karena mereka terikat pada konsep ZOPFAN agar wilayah ini tetap bebas dari persaingan negara adikuasa; (2) Menlu Singapura, Wong Kan Seng, telah memberitahu tentang usul itu

dan akan menjelaskan kepada Malaysia segera sesudah AS membuat keputusan; (3) Malaysia keberatan atas sikap Singapura itu karena kehadiran militer AS itu merupakan pelanggaran atas konsep ZOPFAN dan akan menimbulkan masalah pada wilayah udara Malaysia; (4) negaranya akan menyatakan pendiriannya setelah secara teknis AS selesai melakukan penelitian dan membuat keputusan, karena sampai sejauh ini belum ada kepastian apakah AS setuju menerima tawaran Singapura (*Antara*, 14 Agustus 1989).

b. Sikap Muangthai

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Muangthai, Jent Scharitkul, mengatakan kepada pers di Bangkok tanggal 12 Agustus 1989 bahwa: (1) usul Singapura untuk menyediakan tempat bagi fasilitas militer AS merupakan masalah bilateral yang tidak memerlukan suatu pendirian regional; (2) usul Singapura itu bukan hal yang baru dan setiap negara anggota ASEAN memiliki hak kedaulatan untuk memutuskan sikapnya; (3) Singapura sudah lama memperoleh devisa dari galangan kapal modernnya dan kapal-kapal dari semua bangsa, termasuk kapal dari AS dan Uni Soviet, telah singgah di dok daratnya untuk melakukan perbaikan dan perawatan; (4) meskipun Muangthai tidak keberatan atas usul itu, tetapi pangkalan AS itu dapat menjadi masalah yang sangat peka; (5) sejauh ini fasilitas-fasilitas yang ditawarkan Singapura itu bukan merupakan pangkalan militer sepenuhnya, tetapi hanya fasilitas perawatan kapal dan pelabuhan; (6) Malaysia hendaknya menyusun suatu kerangka bilateral dengan Singapura untuk menjernihkan kekisruhan mengenai sifat jangkauan dan perincian rencana yang diusulkan itu; (7) ASEAN seharusnya mendengarkan Filipina yang secara langsung terlibat dalam masalah ini (*Kompas*, 13 Agustus 1989).

Ketua Badan Keamanan Nasional Muangthai, Suvit Suthanukul, mengatakan: (1) usul Singapura itu akan membantu meredakan ketegangan politik di Filipina; (2) secara global, pangkalan militer AS beserta kekuatan udara, laut, daratnya di wilayah Asia Tenggara dan Asia-Pasifik perlu dipertahankan; (3) kepergian kekuatan AS akan menimbulkan kekosongan kekuatan yang membahayakan Asia-Pasifik; (4) meskipun rencana untuk memindahkan sebagian pangkalan AS ke Singapura masih dipelajari, namun Muangthai tidak menentang perpindahan itu (*Antara*, 13 Agustus 1989).

c. Sikap Indonesia

Sekembalinya dari menghadiri Konferensi Internasional tentang Kamboja, Menlu Ali Alatas mengatakan kepada pers di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 6 Agustus bahwa: (1) sikap Indonesia terhadap usul Singapura untuk menjadi tempat fasilitas militer AS masih menunggu perkembangan lebih lanjut; (2) sejauh ini usul itu baru memasuki tahap survei dan belum ada komitmen antara kedua pihak; (3) sebelumnya Singapura sudah menjelaskan kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk tetap mendukung konsep ZOPFAN. Di samping itu Singapura juga akan memperhatikan pandangan-pandangan anggota ASEAN lainnya, jika tawaran itu harus direalisasikan; (4) mungkin yang dikehendaki kedua pihak adalah untuk meningkatkan penggunaan fasilitas militer yang sudah ada di Singapura (*Angkatan Bersenjata*, 8 Agustus 1989).

Mantan Menlu Mochtar Kusumaatmadja mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 8 Agustus 1989 bahwa: (1) tawaran Singapura itu mengandung hikmah bagi para pemikir strategi militer ASEAN untuk memikirkan kemungkinan menggalang suatu kerjasama militer ASEAN yang konseptual, karena minimal sudah ada dua Menlu ASEAN yaitu Singapura dan Malaysia mengungkapkan nada yang serupa; (2) kerjasama militer ASEAN sebenarnya sudah ada yaitu berupa pertukaran informasi dan intelijen, upaya menggunakan alat militer yang sama, penyediaan fasilitas latihan dan bentuk kerjasama militer lainnya, kerjasama militer yang didasarkan pemikiran konseptual dari ASEAN belum ada; (3) sikap hati-hati Indonesia tentang kerjasama militer dapat dimengerti, tetapi keinginan anggota-anggota ASEAN lainnya untuk mengadakan kerjasama semacam itu perlu dipikirkan secara serius; (4) kerjasama semacam itu jangan berupa pakta militer, karena hal itu mengandung pengertian dibentuk untuk menghadapi lawan; (5) pemikiran ini dilandaskan pada kenyataan mengenai beberapa bentuk kerjasama militer di kawasan ASEAN yang melibatkan pihak luar; (6) sebagian dari bentuk kerjasama militer itu merupakan peninggalan sejarah yang diteruskan karena tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu, sudah waktunya bagi ASEAN untuk memikirkan suatu pilihan yang didasarkan pada konsepsi sendiri; (7) ada tiga hal yang mungkin menjadi motivasi Singapura: (a) negara itu ingin memperoleh lebih banyak keuntungan dari jasa perbaikan atau perawatan kapal-kapal AS yang selama ini sudah dilakukannya; (b) ia merasa bahwa berkurangnya kehadiran AS di kawasan ini, akan mengurangi keseim-

bangun kekuatan militer di kawasan ASEAN; (c) ia ingin membantah argumenasi bahwa di antara ASEAN, hanya Filipina yang mengandung beban menjadi tuan rumah kehadiran AS; (8) Singapura akan memegang teguh pada pernyataannya, yaitu mengundang AS hanya untuk memanfaatkan fasilitas militer dan bukan untuk menempatkan pangkalan militer (*Antara*, 9 Agustus 1989).

Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 10 Agustus 1989 bahwa: (1) semua negara ASEAN masih tetap memegang teguh dan menghormati kesepakatannya mengenai ZOPFAN; (2) di kawasan ASEAN telah timbul ketahanan regional yang berasal dari ketahanan nasional masing-masing anggotanya dan persahabatan ASEAN juga semakin kuat; (3) kerjasama militer ASEAN saat ini telah baik dan tidak memerlukan latihan bersama enam negara sekaligus (*Antara*, 10 Agustus 1989).

Menteri Polkam RI, Sudomo, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 14 Agustus 1989 bahwa: (1) terlalu pagi untuk memberikan pendapat mengenai tawaran Singapura itu, selain karena pokok permasalahan belum jelas juga perlu mengumpulkan keterangan yang lengkap dan menyeluruh tentang maksud Singapura. Indonesia tetap belum dapat memberikan komentar lebih jauh, menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah Singapura; (2) pernyataan pemerintah Singapura itu ibarat balon yang dilemparkan untuk memancing reaksi (*Suara Pembaruan*, 15 Agustus 1989).

Menlu Ali Alatas mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 15 Agustus 1989 bahwa: (1) persatuan dan solidaritas ASEAN cukup kuat dan telah berkembang cukup mantap untuk membedakan antara masalah pokok dan sampingan; (2) keinginan dan pernyataan Singapura belum jelas, karena masih dalam taraf peninjauan; (3) untuk menghadapi setiap perkembangan di ASEAN, kita tetap berpegang pada landasan pokok yang telah disepakati bersama; (4) prinsip kerjasama ASEAN mengenai sikap dasar untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas bersama di kawasan ini sudah jelas sekali (*Pelita*, 16 Agustus 1989).

d. Sikap Filipina

Presiden Corazon Aquino mengatakan di Manila tanggal 8 Agustus 1989 bahwa: (1) tawaran Singapura sebagai tuan rumah fasilitas militer AS tidak akan merupakan suatu faktor penting dalam penentuan masa depan pangkalan Subic dan Clark di Filipina; (2) yang

menjadi dasar pertimbangan paling utama untuk mengambil keputusan adalah kemampuan pangkalan-pangkalan itu untuk mendukung kepentingan nasionalnya; (3) pada bulan Desember 1989, negaranya akan menyelenggarakan perundingan-perundingan dengan AS mengenai masalah itu (*Suara Pembaruan*, 9 Agustus 1989).

Ketua Dewan Keamanan Nasional Filipina, Rafael Ilto, mengatakan kepada pers di Manila tanggal 7 Agustus 1989: (1) Presiden Corazon Aquino akan berkunjung ke Washington tanggal 8 November 1989 untuk membahas masalah masa depan pangkalan AS di Filipina; (2) Dewan Keamanan Nasional negaranya telah mengkaji pengaturan keamanan dengan Washington, termasuk persetujuan pangkalan yang akan berakhir masa berlakunya bulan September 1991; (3) Dewan Keamanan Nasional Filipina menyadari pentingnya mencari pemecahan lebih awal mengenai masalah pangkalan militer itu dan memutuskan untuk mempercepat penyelesaian rencana penggunaan alternatif fasilitas-fasilitas militer AS serta memodernkan Angkatan Bersenjata Filipina; (4) Presiden Aquino telah memerintahkan untuk mengkaji penggunaan bekas pangkalan itu, setelah AS menarik diri secara sebagian atau secara keseluruhan (*Pelita*, 8 Agustus 1989).

Pada saat yang sama, Menlu Manglapus mengatakan kepada Harian *Straits Times* bahwa: (1) tawaran itu akan mempunyai implikasi cukup besar pada pembicaraan mengenai masa depan kedua pangkalan AS tersebut; (2) tawaran Singapura itu sungguh-sungguh, karena Filipina sudah diberitahu secara formal (*Pelita*, 8 Agustus 1989).

Menlu Filipina, Raul Manglapus, mengatakan kepada pers di Manila tanggal 16 Agustus 1989 bahwa: (1) negaranya mendukung penyelenggaraan suatu konsultasi regional tingkat tinggi mengenai tawaran Singapura untuk menampung pangkalan militer AS; (2) Malaysia telah memberitahukan kepada Dubes Filipina di Kuala Lumpur bahwa seharusnya Singapura berkonsultasi terlebih dahulu dengan Malaysia karena penggunaan fasilitas seperti itu akan melibatkan penggunaan wilayah udara dan laut Malaysia; (3) kepentingan dalam negeri adalah lebih penting daripada kepentingan regional, tetapi kepentingan regional hendaknya juga mendapat pertimbangan yang serius; (4) Filipina ingin mengetahui sikap Singapura sesungguhnya tentang kelanjutan kehadiran AS di Filipina dan di Asia Tenggara pada umumnya (*Antara*, 17 Agustus 1989).

e. Sikap Singapura

Dalam siaran persnya tanggal 7 Agustus 1989 Partai Demokrasi Singapura (SDP) mengatakan bahwa: (1) SDP menentang pembangunan fasilitas militer AS di Singapura karena akan meningkatkan ancaman perang bagi negaranya; (2) SDP tidak dapat memahami pergeseran kebijaksanaan luar negeri negaranya dari netralitas tradisional menjadi kebijaksanaan yang memiliki pakta de facto dengan sebuah negara adikuasa; (3) walaupun berterima kasih kepada AS atas perlindungan strategisnya sehingga memungkinkan negara-negara anggota ASEAN berkembang tanpa gangguan, tetapi SDP tidak begitu setuju pada sikap AS untuk menggunakan fasilitas Singapura; (4) SDP tidak dapat mengerti bagaimana kehadiran pasukan AS di Singapura tidak akan mengganggu konsensus ASEAN tentang ZOPFAN; (5) pembangunan fasilitas penyimpanan persenjataan AS akan sangat meningkatkan ancaman perang di Singapura, karena jika AS membangun sebuah pusat elektronik dan komunikasi rahasia, maka Soviet akan merasa berkewajiban menetralisasikan (*Antara*, 9 Agustus 1989).

Di pihak lain, Menlu Singapura, Wong Kan Seng, mengatakan di Singapura tanggal 12 Agustus 1989: (1) bila AS menarik kekuatan militernya dari Asia Tenggara akan terjadi suatu pergulatan di kalangan negara-negara besar yang sedang menanti di garis pinggir; (2) kekosongan yang ditimbulkan oleh penarikan pasukan AS itu dapat diisi oleh Uni Soviet, Jepang, Cina ataupun India; (3) negara-negara non-komunis agar membantu mempertahankan kehadiran AS, karena kepergiannya akan mengganggu stabilitas kawasan; (4) ia percaya, tidak satu pun negara ASEAN menginginkan penarikan pasukan AS dalam waktu dekat, karena mundurnya satu kekuatan militer dari sebuah daerah, selalu akan diisi oleh suatu kekuatan atau kekuatan-kekuatan besar yang lain; (5) tawaran negaranya dibuat untuk menunjukkan kepada Filipina bahwa negara-negara lain bersedia berbagi beban politik atas keberadaan pangkalan AS di Asia Tenggara (*Antara*, 14 Agustus 1989). Lebih lanjut ia mengatakan: (1) AS kini memiliki dua fasilitas militer di Filipina, tetapi kehadirannya menimbulkan polemik; (2) Singapura mempunyai hak berdaulat untuk membuat keputusan-keputusan sendiri mengenai masa depannya tanpa campur-tangan pihak luar; (3) Singapura memang tidak mengharapkan para tetangga sepenuhnya menyetujui sikapnya; (4) masalah-masalah dalam negeri yang menyangkut defisit

anggaran dan perdagangan, barangkali merupakan sebab utama AS untuk menarik kehadiran militernya dari Asia Tenggara jika bangsa-bangsa di kawasan ini tidak menginginkan kehadirannya; (5) Jepang, Cina dan India semakin kuat untuk mengimbangi angkatan laut AS dan Uni Soviet; (6) pemerintahnya telah berpikir dengan hati-hati mengenai konsekuensi penarikan pasukan AS dari kawasan ini secara mendadak. Tetapi tidak bijaksana, mendorong penarikan kekuatan AS dari kawasan ini secara tergesa-gesa; (7) kehadiran AS sangat bermanfaat bagi ASEAN, karena dapat menyediakan lingkungan yang damai sehingga negara-negara non-komunis dapat melaksanakan pembangunan (*Suara Karya*, 14 Agustus 1989).

Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, mengatakan dalam rapat umum Hari Nasional tanggal 13 Agustus 1989 bahwa: (1) Asia Tenggara tidak dapat mengharapkan terbentuknya ZOPFAN di wilayah itu, kecuali jika negara-negara besar siap menyetujui dan menjaminnya. Sejauh ini Washington, Moskow dan Beijing belum menyetujui konsep tersebut; (2) India sebagai suatu kekuatan militer yang semakin menanjak di wilayah ini harus diminta untuk menyetujui konsep ZOPFAN agar konsep ini berhasil; (3) ia sudah menjelaskan kepada negara-negara ASEAN lainnya mengenai maksud Singapura untuk menyediakan fasilitas AS itu; (4) ia telah meyakinkan PM Mahathir Mohamad bahwa negaranya tidak bermaksud menampung ribuan pasukan AS dan penjelasan itu diterima baik; (5) tawaran negaranya itu untuk meringankan beban Filipina dalam penyediaan tempat bagi pangkalan militer AS; (6) jika tawaran itu tidak banyak membantu Filipina maka tawaran itu tidak akan dibuat karena Singapura ingin membantu rekannya dan mempertahankan keseimbangan stabilitas di seluruh wilayah ini; (7) konsep ZOPFAN serupa dengan Zona Damai di Samudra Hindia (IOZOP atau *Indian Ocean Zone of Peace*) yang diusulkan Sri Lanka dan didukung AS, tetapi tetap tidak dapat mencegah terjadinya ketegangan-ketegangan di anak benua itu; (8) Presiden Soeharto tidak berkeberatan atas maksud Singapura itu; (9) dalam satu dasawarsa mendatang tidak ada satu pun kekuatan yang dapat menggantikan AS di kawasan ini, tetapi dalam 20-30 tahun mendatang situasi strategis di kawasan Pasifik Barat akan menjadi rumit setelah negara-negara di kawasan ini mendapat tekanan militer yang lebih besar; (10) sambil menunggu gagasan ZOPFAN mendapat jaminan, Singapura akan membuat rencana-rencana lainnya (*Suara Pembaruan*, 22 Agustus 1989).

f. Sikap AS

Juru bicara Deparlu AS, Adam Shub, mengatakan kepada pers di Washington tanggal 9 Agustus 1989 bahwa: (1) pembicaraan mengenai kemungkinan pembukaan pangkalan militer AS di Singapura tidak ada kaitannya dengan masa depan pangkalan-pangkalan AS di Filipina; (2) ide memperluas kehadiran AS di Singapura sangat menarik, mengingat lokasinya yang strategis; (3) AS tetap optimis dapat mencapai persetujuan dengan Filipina secara memuaskan; (4) AS belum membuat komitmen ataupun keputusan mengenai kemungkinan pembukaan fasilitas di Singapura dan kedua pihak masih membahas kemungkinan kerjasama keamanan yang lebih kuat untuk beberapa waktu. Di samping itu kunjungan tim teknis militer AS ke Singapura bulan Juni 1989 hanya untuk mengamati fasilitas yang dapat disediakan Singapura (*Antara*, 10 Agustus 1989).

Duta Besar AS untuk Filipina, Nicholas Plat, mengatakan kepada pers di Manila tanggal 10 Agustus 1989: (1) ia yakin negaranya dan Filipina mampu membentuk suatu persetujuan pangkalan yang cukup memuaskan; (2) negara-negara di wilayah ini ingin melihat fasilitas AS di Filipina tetap dipakai; (3) pembangunan yang sedang dilaksanakan di pangkalan Clark akan diperlambat segera setelah pembicaraan masa depan pangkalan militer AS dimulai; (4) kehadiran militer AS di wilayah ini merupakan faktor stabilitas dan telah menimbulkan dampak penting pada perkembangan ekonomi kawasan selama dua dekade; (5) tawaran Uni Soviet untuk menarik pasukannya dari Cam Ranh sebagai pertukaran atas penarikan AS dari Filipina tidak ditanggapi oleh AS (*Antara*, 10 Agustus 1989).

Ketua Sub-komisi DPR AS Bidang Militer Urusan Instalasi Militer, Patricia Schroeder, mengatakan kepada pers di Manila tanggal 14 Agustus 1989 bahwa: (1) AS tidak dapat membayar lebih tinggi lagi untuk mempertahankan basis militer di Filipina; (2) tuntutan Filipina yang mencapai US\$1 lebih untuk sewa pangkalan terlalu tinggi karena AS hanya dapat menyetujui US\$481; (3) AS tidak hanya melindungi Filipina, tetapi juga melindungi jalur laut bagi Jepang, Korea Selatan, Muangthai, Singapura dan seluruh negara kecil di Asia Tenggara; (3) pemerintahnya membutuhkan banyak dana untuk berbagai proyek di dalam negerinya sendiri dan hendaknya negara-negara yang mengambil keuntungan dari kehadiran instalasi militer AS itu bersedia memikul beban keuangan; (4) kehadiran pangkalan AS di Filipina dapat menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan bahkan perbelanjaan personel militer AS memberi-

kan keuntungan tersendiri bagi perekonomian Filipina; (5) keprihatinan kongres AS semakin tinggi karena ketidakpastian mengenai masa depan pangkalan-pangkalan itu; (6) menurut ketentuan, perpanjangan perjanjian pemakaian pangkalan harus disetujui oleh dua pertiga dari 23 anggota Senat Filipina (*Kompas*, 15 Agustus 1989).

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Richard Boucher, mengatakan kepada pers di Washington tanggal 21 Agustus 1989 bahwa: (1) pemerintahnya masih terus mempelajari suatu laporan rahasia mengenai kemungkinan pendirian pangkalan AS di Singapura; (2) AS dan Singapura telah membicarakan kemungkinan kerjasama keamanan yang lebih besar untuk masa mendatang; (3) AS belum membuat keputusan atau komitmen apa pun sehubungan dengan tawaran Singapura itu, karena Singapura hanya menarik sehubungan dengan letaknya yang strategis di Pasifik (*Angkatan Bersenjata*, 24 Agustus 1989).

Komite Hubungan Luar Negeri AS, Dante Fascell, yang sedang berada di Muangthai, mengatakan kepada pers di Bangkok tanggal 24 Agustus 1989 bahwa: (1) kesediaan Singapura itu menunjukkan bahwa negara-negara non-komunis di Asia Tenggara membutuhkan kehadiran AS; (2) kesediaan Singapura itu diperkuat dengan pertemuan negara-negara anggota ASEAN tanggal 4 Agustus 1989; (3) kendatipun menjadi sahabat, anggota ASEAN mempunyai opini yang berbeda mengenai suatu masalah. Tetapi perbedaan itu jangan menghancurkan kerjasama ASEAN yang telah berlangsung lama; (4) AS memberikan penghargaan besar kepada Singapura yang telah bersedia memberikan keleluasaan negaranya untuk mengamankan kawasan ASEAN; (5) AS masih mengharapkan Filipina untuk memperpanjang kontrak pangkalan AS; (6) AS telah tiga kali mengirimkan delegasinya ke Filipina dan telah memperoleh tanda-tanda mengenai keinginan Filipina untuk memperpanjang kontrak itu (*Merdeka*, 24 Agustus 1989).

V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA-MITRANYA

A. PERTEMUAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOGNYA (PMC)

Seusai mengadakan sidang tahunan, para Menlu ASEAN mengadakan pembicaraan dengan mitra dialognya yang juga disebut PMC (*Post Ministerial Conference*) yang diwakili oleh Menlu AS, James Baker; Menlu Jepang, Hiroshi Mitsuzuka; Menlu Australia, Gareth Evans; Menlu Selandia Baru, Russel Marshall; Menlu Kanada, Joe Clark. dan Komisiner

Masyarakat Eropa, Juan Abel Matutes, di Bandar Seri Begawan, tanggal 6-8 Juli 1989, mengenai pembentukan forum kerjasama ekonomi Asia-Pasifik (usul PM Australia, Bob Hawke yang disampaikan di Seoul 31 Januari 1989), masalah Kamboja, hubungan ekonomi khusus AS-ASEAN, yang disebut sebagai inisiatif AS-ASEAN, hubungan ekonomi MEE-ASEAN sehubungan akan dibentuknya pasar tunggal di Eropa Barat, bantuan ekonomi Jepang kepada ASEAN, pengungsi Vietnam dan beberapa masalah politik, seperti konferensi internasional di Paris, situasi di RRC, hubungan Timur-Barat, Afghanistan, Afrika Selatan dan Timur Tengah.

Pertemuan itu akan dilangsungkan secara 6+6 (ASEAN dan enam negara mitra dialog) atau 6+5+1 (ASEAN, lima negara mitra dialog dan MEE) atau 6+1 (ASEAN dan satu persatu negara mitra dialog).

Dalam kesempatan itu, Wakil Menlu Perancis, Ny. Edwige Avice, hadir pula di Bandar Seri Begawan untuk mengadakan pembicaraan dengan para Menlu ASEAN mengenai persiapan konferensi internasional mengenai Kamboja di Paris.

Tema yang dibawa Menlu James Baker adalah *creative responsibility sharing*. Beberapa pengamat berpendapat bahwa tema ini, yang diartikan sebagai kemitraan global, sebenarnya ditujukan kepada Jepang yang perekonomiannya demikian maju agar mengambil-alih tanggung jawab global yang selama ini dipikul AS (*Suara Pembaruan*, 8 Juli 1989).

Mengenai rencana pembentukan Forum Perdagangan Asia-Pasifik, baru mencapai tahap penjajagan. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan Canberra, bulan November 1989. Pada pembicaraan tentang masalah ini sebenarnya terjadi perdebatan sengit antara Australia dan MEE. Australia bersikeras menghalangi usaha MEE untuk memberikan suaranya dalam pertemuan yang sedang membahas kerjasama Asia-Pasifik itu. Apa yang sedang berlangsung ini dikatakannya sebagai proses yang secara geografis bersifat regional. Sedangkan MEE menegaskan agar kawasan itu tidak diubah menjadi sebuah blok perdagangan baru. Dikatakan bahwa usul Australia itu bertentangan dengan semangat dan ketentuan GATT. MEE tidak dapat menerima kenyataan bahwa 50% dari cakupan perdagangannya sedang dibahas pihak lain tanpa dirinya terwakili untuk menyampaikan suaranya. Bila usul kerjasama itu mencapai kemajuan maka telah semestinya juga terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Kerangka yang paling tepat untuk membahas usul Australia itu adalah semacam PMC, yang juga mengikutsertakan MEE dan Australia (*Antara*, 10 Juli 1989).

Tentang masalah Kamboja, mereka memuji usaha Indonesia yang telah berusaha mengupayakan tercapai-

nya penyelesaian konflik Kamboja secara menyeluruh. Mereka menyambut baik rencana ICK di Paris yang akan datang.

Mengenai pengungsi Vietnam dikatakan bahwa beberapa negara di antara mereka menyanggupi untuk memberi bantuan, baik berupa dana keuangan maupun pemukiman kembali para pengungsi di negaranya.

Sedangkan mengenai pasar tunggal Eropa dijelaskan bahwa pembentukannya itu tidak akan membahayakan ASEAN, justru sebaliknya dapat memberi kemungkinan peningkatan hubungan kerjasama ASEAN-MEE.

Tentang hubungan ekonomi ASEAN dengan mitra-mitra dialognya itu dikatakan terus meningkat dan diharapkan akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Sidang itu juga ditandai dengan penyerahan instrumen tambahan (*Instruments of Accession*) pada Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation*) di Asia Tenggara dari Menlu PNG, Michael Somare, kepada Menlu Mohammed Bolkia selaku Ketua Komite Tetap ASEAN dalam AMM ke-22 ini. Penyerahan yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 1989 itu berarti bahwa kini PNG merupakan negara bukan ASEAN pertama yang ikutserta dalam Perjanjian *Treaty of Amity and Cooperation* itu. Kerjasama yang ditandatangani di Bali tanggal 24 Februari 1976 itu diadakan untuk meningkatkan perdamaian, persahabatan dan kerjasama di antara rakyat-rakyat di Asia Tenggara.

Secara terinci pembahasan tentang masalah-masalah itu adalah sebagai berikut:

1. Hubungan ASEAN-Mitra Dialog

Wakil MEE, Juan Abel Matutes, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) langkah-langkah pencapaian pasaran bersama Eropa telah pasti. Pasaran ini justru menawarkan begitu banyak kesempatan bagi kompetisi, baik di Eropa maupun di kawasan dunia lainnya, termasuk kawasan Asia dan Amerika; (2) Eropa Barat merupakan pasaran kedua terbesar setelah AS dan kedua terbesar sebagai donor setelah Jepang. Investasi langsung Eropa Barat di kawasan Asia-Pasifik juga menunjukkan peningkatan dan 65 buah bank Eropa misalnya memiliki cabangnya di Singapura jumlah yang sama dengan di Tokyo; (3) pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di Eropa benar-benar tergantung pada perdagangan internasional, baik dalam barang maupun jasa. Oleh sebab itu MEE mempunyai alasan kuat untuk mendukung pemecahan masalah perdagangan dan ekonomi global secara multilateral (*Antara*, 6 Juli 1989). Selanjutnya pada pembukaan dialog tanggal 6

Juli 1989, dia menjelaskan bahwa: (1) pembentukan pasaran tunggal Eropa mulai tahun 1992 akan menawarkan peluang-peluang baru bagi pertumbuhan negara-negara Asia Tenggara, masyarakat Eropa telah menawarkan suatu potensi pertumbuhan yang lebih kuat bagi ekspor-impor ASEAN bila dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh pasar Jepang dan AS dari tahun 1983 sampai 1987; (2) pasaran tunggal Eropa itu juga akan mempermudah tugas pemilik industri dan para pedagang (*Antara*, 7 Juli 1989).

Pernyataan wakil MEE ini tampaknya untuk meyakinkan ASEAN dan negara-negara berkembang lainnya bahwa pasaran tunggal Eropa bukan merupakan kawasan perdagangan yang tertutup. Kekhawatiran itu muncul di kalangan negara-negara berkembang, seperti beberapa negara ASEAN, yang mengandalkan ekspor sebagai basis ekonominya.

Dalam pertemuan 6+1 tanggal 7 Juli 1989, Menlu AS, James Baker, mengatakan bahwa: (1) pemerintahnya menyediakan bantuan US\$13 juta bagi Program Investasi dan Perdagangan untuk mempererat hubungan AS-ASEAN. Dana ini akan disalurkan melalui Badan Bagi Pembangunan Internasional AS (AID); (2) bantuan itu disediakan untuk sektor swasta ASEAN guna mendorong terbukanya peluang pasar bagi produk-produk bersama perusahaan AS-ASEAN (*Kompas*, 8 Juli 1989); (3) untuk jangka pendek maupun panjang, ASEAN dan kawasan Asia Tenggara sangat penting bagi AS (*Suara Pembaruan*, 8 Juli 1989).

Kerjasama swasta AS dan ASEAN diadakan untuk menangani beberapa kepentingan di AS dan ASEAN guna meningkatkan: (1) kerjasama perdagangan dan investasi di antara negara-negara ASEAN sendiri maupun antara AS dan ASEAN; (2) kerjasama antara pemerintah AS dan pemerintah-pemerintah di negara-negara ASEAN; (3) kerjasama pemerintah-pemerintah ASEAN untuk mempermudah bisnis dan investasi AS, mempermudah pelimpahan teknologi, terutama aplikasi perdagangan di ASEAN; (4) kerjasama di OPIC (*Overseas Private Investment Corporation*) untuk mendirikan lembaga penyebaran dana guna membiayai usaha-usaha bersama AS-ASEAN (*Suara Pembaruan*, 8 Juli 1989).

Pada pertemuan 6+1 tanggal itu juga, Menlu Australia, Gareth Evans, menegaskan bahwa: (1) pada masa-masa mendatang Australia bertekad untuk meningkatkan hubungan dagang dengan ASEAN; (2) dalam dua tahun terakhir ini perdagangan Australia-ASEAN meningkat 6% menjadi US\$5,9 milyar (*Kompas*, 8 Juli 1989).

Pada pertemuan 6+1 tanggal 7 Juli 1989, Menlu Kanada, Joe Clark, mengemukakan bahwa: (1) angka

perdagangan antara Kanada dan ASEAN dalam tahun 1988 mencapai US\$2,6 milyar. Ini berarti meningkat 75% bila dibandingkan dengan angka perdagangan tahun 1986; (2) angka perdagangan sebesar itu menghasilkan keuntungan US\$300 juta bagi ASEAN; (3) pada tahun 1989 angka perdagangan itu diharapkan mencapai US\$3 milyar (*Kompas*, 8 Juli 1989); (4) untuk meningkatkan saling pengertian antara ASEAN dan Kanada maka pada tanggal 10 Juli 1989 akan diresmikan Pusat ASEAN-Kanada, yang pada tahun pertamanya akan dijadikan tempat pelaksanaan kerjasama pembangunan ASEAN-Kanada dan lembaga-lembaga regional, setelah itu akan dikembangkan lebih jauh; (5) pendidikan dan kepelatihan, terutama untuk para profesional dan generasi muda ASEAN dan Kanada, akan merupakan bagian terbesar dari program pusat itu; (6) kerjasama lain yang sangat penting adalah bidang lingkungan hidup, karena masalah ini sulit dan kompleks, termasuk iklim global, polusi air dan tanah, penciptaan hutan tropis dunia dan kemampuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi tanpa harus merusak lingkungan alam; (7) Kanada merupakan salah satu pendukung pembangunan berkelanjutan, oleh sebab itu menyambut baik rencana ASEAN untuk menyelenggarakan pertemuan regional sebagai tindak lanjut dari Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan; (8) Kanada mengundang ASEAN untuk mengikuti Global 90, suatu konperensi lingkungan dan pameran perdagangan di Vancouver Mart. Global 90 dirancang untuk menunjukkan kepada dunia bahwa melindungi lingkungan dan meningkatkan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang bersaing, namun demikian ada sejumlah produk, jasa dan teknologi yang dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan itu; (9) Kanada juga mengundang ASEAN untuk menghadiri pertemuan khusus ASEAN-Kanada di Kanada, musim gugur 1990 (*Antara*, 7 Juli 1989).

Dalam pertemuannya dengan para Menlu ASEAN tanggal 8 Juli 1989, Menlu Jepang, Hiroshi Mitsuzuki, mengatakan bahwa: (1) Jepang menolak usul ASEAN untuk mengurangi tingkat suku bunga pinjaman yang diakibatkan oleh apresiasi nilai mata uang Yen. Tetapi pemerintahnya berjanji akan memberi pinjaman lunak yang baru sebagai salah satu cara untuk mengatasi beban hutang itu; (2) Jepang menyediakan bantuan US\$30 milyar dengan bunga lunak bagi negara-negara berkembang, termasuk ASEAN. Tetapi pinjaman baru ini tidak boleh untuk membayar hutang lama; (3) hutang tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, tetapi juga merupakan an-

caman bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan (*Merdeka*, 10 Juli 1989).

2. Rencana Pembentukan Forum Asia-Pasifik

Para Menlu ASEAN masih bersikap dingin atas usul Australia mengenai pembentukan Forum Ekonomi Asia-Pasifik. Beberapa negara anggota ASEAN mengkhawatirkan munculnya suatu entitas baru, yang juga didukung Jepang dan Australia dapat menggantikan ASEAN sehingga memudahkan Tokyo maupun Washington untuk mendominasi perekonomian kawasan Pasifik. Hal ini antara lain ditunjukkan dalam sikap Menlu Indonesia, Ali Alatas, yang pada tanggal 5 Juli 1989 menegaskan bahwa ASEAN telah memiliki forum sendiri, suatu forum dialog tahunan dengan mitra dagangnya yang cakupannya dapat diperluas sampai meliputi kawasan Asia-Pasifik. Sikap ASEAN yang demikian itu disebabkan oleh masih belum siapnya beberapa negara ASEAN untuk menanggapi usul itu. Indonesia mengharapkan agar usaha peningkatan kerjasama perdagangan Asia-Pasifik dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme yang telah ada, bukan dengan pembentukan lembaga baru. Penegasan Menlu Ali Alatas itu juga disampaikan lagi pada konferensi pers akhir PMC (*Antara*, 6 Juli 1989). Hal senada disampaikan oleh Menlu Malaysia, Abu Hassan Omar, yang menegaskan bahwa ASEAN harus hati-hati untuk menerima setiap usulan baru. Hal ini perlu diingatkan karena masih terdapat ketidakseimbangan perdagangan dan fiskal antara kekuatan ekonomi besar dunia, kecenderungan pembentukan blok-blok perdagangan dan semakin meningkatnya proteksionisme (*Antara*, 6 Juli 1989). Sementara itu, Menlu Singapura, Wong Kan Seng, sebaliknya justru menanggapi secara antusias. Dikatakannya bahwa setiap gagasan yang akan memperluas hubungan ASEAN dengan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik patut dipertimbangkan. Apalagi usul Australia itu sebenarnya bertitik-tolak pada ASEAN sebagai intinya (*Antara*, 6 Juli 1989).

Dalam konferensi pers di Bandar Seri Begawan tanggal 5 Juli 1989, Menlu Australia, Gareth Evans, menegaskan bahwa gagasan negaranya itu relevan dengan keadaan sekarang, mengingat perdagangan antar negara-negara Asia dalam tahun 1988 telah mencapai sekitar US\$200 milyar. Dia tidak merasa khawatir atas sikap ASEAN itu. Usulnya itu memiliki aspek yang sangat sensitif, karena itu untuk mencapai konsensus membutuhkan waktu yang panjang. Ia tidak membawa cetak biru mengenai Forum Perdagangan Asia-Pasifik, ia hanya akan mendengarkan pemikiran-pemikiran

yang muncul (*Antara*, 6 Juli 1989). Biarkanlah forum itu terbentuk secara alamiah (*Kompas*, 6 Juli 1989). Selanjutnya pada pembukaan dialog itu, dia menegaskan bahwa: kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan ekonomi regional dengan pertumbuhan paling cepat di dunia dengan mencatat sekitar 40% volume perdagangan dunia, meskipun terdapat sejumlah ketidakpastian yang dapat mempengaruhi prospek-prospek kawasan itu. Ketidakpastian itu antara lain berupa rintangan-rintangan non-tarif dalam perekonomian dunia dan neraca perdagangan yang demikian tidak berimbang di kawasan itu (*Antara*, 7 Juli 1989).

Seusai mengadakan pembicaraan dengan Menlu Hiroshi Mitsuzuka tanggal 5 Juli 1989 mengenai Forum Perdagangan Asia-Pasifik, Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa Jepang berpendapat, saat ini yang penting adalah mendengarkan pemikiran yang berkembang di sejumlah negara kawasan Pasifik, termasuk ASEAN. Jepang tidak berkeberatan menghadiri pertemuan pertama di Canberra bulan November 1989, asal didahului dengan pertemuan para pejabat tinggi negara-negara kawasan Pasifik (*Antara*, 6 Juli 1989).

Tanggal 5 Juli 1989, Menlu AS, James Baker, menegaskan bahwa ia akan meminta negara-negara anggota ASEAN agar pada prinsip-prinsipnya menyepakati suatu kerangka baru bagi kerjasama ekonomi di Pasifik untuk mencegah pertikaian perdagangan (*Antara*, 6 Juli 1989). Selanjutnya pada pembukaan pertemuan itu, Menlu James Baker mengatakan: (1) dua masalah yang harus dibahas dalam pertemuan ini adalah peningkatan kerjasama kawasan Pasifik dan keamanan Asia Tenggara, namun demikian masih banyak masalah masih memerlukan konsensus agar gagasan menjadi kenyataan; (2) kerjasama ekonomi kawasan Pasifik merupakan sesuatu yang penting karena percepatan pertumbuhan dan saling ketergantungan di antara negara-negara di kawasan itu telah melampaui kemampuan lembaga-lembaga organisasi untuk menangani dampak-dampaknya; (3) ia tidak membawa cetak biru mengenai cara apa dan mekanisme mana yang harus dilakukan demi terwujudnya kerjasama di kawasan itu. Yang perlu kini adalah dialog untuk mencari kesamaan pandangan mengenai prinsip-prinsip dan struktur mekanisme itu; (4) kawasan Asia-Pasifik merupakan bagian integral dari masa depan AS, oleh karena itu kehadirannya di kawasan itu berguna untuk memperkuat kemampuan menghadapi tantangan di masa depan; (5) terdapat 7 pokok persoalan awal yang harus diatasi demi terbentuknya mekanisme kerjasama ekonomi di kawasan itu, yakni: (a) masalah penting yang harus dibahas adalah

perdagangan, investasi dan infrastruktur ekonomi regional, termasuk transportasi dan komunikasi serta perlindungan sumber alam; (b) keseluruhan negara Pasifik harus mengakui perbedaan sistem ekonomi, sosial dan perbedaan tingkat pembangunan di setiap negara; (c) prakarsa swasta dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pasar bebas harus diakui sebagai usaha untuk menawarkan tingkat hidup warganya; (d) mereka harus mempunyai persamaan komitmen mengenai ekonomi pasar untuk mendukung arus barang jasa, modal, teknologi dan gagasan-gagasan secara bebas; (e) setiap lembaga di Pasifik harus merupakan suatu bagian yang integral untuk mengembangkan perdagangan dan investasi, tetapi lembaga-lembaga itu jangan sampai mengganggu upaya-upaya yang telah ada, seperti *Uruguay Round* dan OECD; (f) setiap usaha harus menghormati, menjaga dan bahkan meningkatkan kontribusi ASEAN pada kawasan Pasifik; (g) dukungan pemerintah dalam bentuk apa pun harus luwes agar mekanisme yang baru nanti dapat berjalan (*Antara*, 6 Juli 1989).

Menlu Australia berpendapat, kerjasama regional yang efektif dapat menjamin momentum pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Menlu Selandia Baru juga senada, namun demikian dia menambahkan bahwa banyak forum yang dapat dimanfaatkan dan bukan hanya seperti forum yang diusulkan oleh Australia (*Antara*, 6 Juli 1989). Selandia Baru akan menentang setiap blok perdagangan dan sebaliknya akan terus mengupayakan perdagangan bebas (*Kompas*, 6 September 1989).

Pada pertemuan 6 + 5 + 1 tanggal 6 Juli 1989, Menlu Australia, Gareth Evans, mengatakan bahwa suatu kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia-Pasifik penting untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi di kawasan itu, sekaligus untuk mendukung sistem perdagangan multilateral (*Kompas*, 7 Juli 1989). Dalam penjelasan selanjutnya pada pertemuan 6 + 1 tanggal 7 Juli 1989, Menlu Gareth Evans menegaskan bahwa: (1) *South Pacific Forum* juga akan mengadakan semacam dialog seperti halnya dilakukan ASEAN dengan negara-negara lain, tetapi berbeda dengan dialog ASEAN - mitra-mitra wicaranya; (2) dia akan meminta PM Bob Hawke untuk segera memberitahu kepala-kepala negara yang akan diundang menghadiri pertemuan di Australia, bulan November 1989, agar mengirimkan Menteri-menteri mereka untuk meneruskan proses dialog (*Suara Pembaruan*, 8 Juli 1989).

Selanjutnya pada pertemuan 6 + 1 tanggal 7 Juli 1989 itu juga Menlu AS, James Baker, mengatakan pula

bahwa: (1) cukup alasan bagi suksesnya ide tersebut. ASEAN mempunyai bentuk, basis dan fundasi bagi usaha semacam itu, yang bukan saja menguntungkan dirinya tetapi juga mitra wicaranya. Kiranya ASEAN cenderung untuk mengembangkan badan yang telah ada, seperti *ASEAN Pacific Cooperation* dengan menyertakan para Menteri Perekonomiannya; (2) untuk waktu ini Cina sebaiknya tidak diikutsertakan karena akan menimbulkan masalah, cukup kelompok inti saja, yakni seluruh anggota ASEAN, para mitra bicara dan Korea Selatan; (3) Jepang sangat mendukung ide itu dan memberi pandangan konstruktif, karena pada suatu ketika hal itu juga akan menjadi idenya. Namun demikian menurut jubah delegasi Jepang, Seiichi Kondo, Jepang masih akan mengikuti konsensus apa pun yang dicapai ASEAN; (4) kerjasama yang diprakarsai oleh PM Australia dengan nama "Kerjasama Ekonomi Tepian Pasifik" itu dibawa ke Bandar Seri Begawan tanpa ide spesifik. Banyak ide yang mirip dan AS hanya menjadi katalis agar ide itu dapat terwujud (*Suara Pembaruan*, 8 Juli 1989).

Senada dengan hal itu, Menlu Selandia Baru, Russel Marshall, menilai adanya peningkatan perhatian atas kerjasama ekonomi Asia-Pasifik. Usulan PM Bob Hawke itu sangat membantu untuk memfokuskan perhatian akan pentingnya kerjasama semacam itu (*Kompas*, 7 Juli 1989).

Sementara itu Menlu Kanada, Joe Clark, menegaskan bahwa Asia-Pasifik merupakan mitra dagang Kanada yang terbesar setelah AS.

Sedangkan Menlu James Baker menegaskan bahwa: (1) pertumbuhan perdagangan di Pasifik amat pesat, yang pada tahun 1988 mencapai US\$271 milyar; (2) perdagangan antar negara Asia mencapai US\$200 milyar, dan investasi AS di Asia meningkat dua kali lipat bila dibandingkan tahun 1982, mencapai US\$10 milyar; (3) kerjasama ekonomi Asia-Pasifik merupakan salah satu agenda utama AS (*Kompas*, 7 Juli 1989).

3. Masalah Kamboja

Berbagai pidato pada pembukaan dialog itu mendukung Indonesia dan Perancis sebagai Ketua Bersama (*co Chairman*) ICK. Pada umumnya mereka mengakui peranan Indonesia untuk membantu menyelesaikan masalah Kamboja, baik melalui JIM maupun sebagai tuan rumah pertemuan Hun Sen dan Norodom Sihanouk, Mei 1989 (*Antara*, 7 Juli 1989).

ASEAN dan seluruh mitra dialognya menyambut baik berlangsungnya ICK dan mengharapkan agar konferensi itu menghasilkan suatu penyelesaian yang menyeluruh di Kamboja, baik yang menyangkut aspek internal maupun aspek eksternal (*Kompas*, 8 Juli 1989).

Dalam pertemuan 6+1 tanggal 7 Juli 1989, Menlu AS, James Baker, menegaskan bahwa: (1) pemerintahnya tetap mendukung sikap AS untuk menyelesaikan konflik Kamboja secara menyeluruh; (2) ASEAN dan negara-negara Barat harus menjamin terciptanya suatu Kamboja yang merdeka dan stabil. Negara Kamboja yang baru harus bebas menentukan masa depannya sendiri dan tidak akan didominasi oleh Khmer Merah yang kejam itu. Walaupun AS mempunyai preferensi agar Khmer Merah tidak diikutsertakan dalam pemerintahan *kuadripartit*, tetapi AS juga realistis untuk melihat fakta-fakta yang ada. Lagipula Pangeran Norodom Sihanouk berpendapat, lebih baik Khmer Merah ikut dalam pemerintahan sementara daripada berada di hutan untuk mengobarkan perang saudara. Tetapi AS tetap menyatakan tidak membantu siapa-siapa (*Suara Pembaruan*, 8 Juli 1989); (3) untuk menghindari terjadinya dominasi itu diperlukan sejumlah prinsip dasar yang menjamin suatu penyelesaian masalah Kamboja secara menyeluruh, dan prinsip-prinsip dasar itu di antaranya adalah gencatan senjata, langkah efektif untuk mencegah berkuasanya kembali Khmer Merah, aturan pembagian kekuasaan, dan pemilihan umum yang bebas bagi rakyat Kamboja. Hal ini penting karena sangat membantu tercapainya suatu penyelesaian internal di Kamboja; (4) suatu pemerintahan sementara di Kamboja di bawah pimpinan Pangeran Norodom Sihanouk merupakan suatu hal yang realistis bagi tercapainya suatu pembagian kekuasaan dengan kekuatan non-komunis di Kamboja; (5) merupakan hal yang tepat jika ICM diorganisasikan oleh PBB, ICM sebaiknya dibentuk di bawah panji-panji PBB; (6) ICM bertugas mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja, membantu dan melindungi pengaturan peralihan kekuasaan serta memantau pemilihan umum dan stabilitas perdamaian di Kamboja; (7) JIM telah memberikan semua prinsip dasar yang diperlukan bagi penyelesaian konflik Kamboja (*Kompas*, 8 Juli 1989).

Dalam suatu jumpa pers tanggal 7 Juli 1989, Menlu James Baker juga menandakan bahwa selama beberapa kali mengadakan pembicaraan dengan AS, Uni Soviet tidak pernah menolak pembentukan ICM di bawah panji-panji PBB (*Suara Pembaruan*, 8 Juli 1989).

Pernyataan Menlu James Baker itu dianggap pen-

ting, karena selama ini ICM dikecam keras oleh Vietnam dan rezim Phnom Penh dukungan Vietnam yang dikatakan tidak pantas untuk melakukan hal itu, karena PBB tidak pernah mengakui rezim Phnom Penh. Sikap Uni Soviet itu diperkirakan dapat mengubah sikap Vietnam, karena selama ini Moskow dikenal sebagai pendukung utama Vietnam di bidang dana dan persenjataan.

Dalam pertemuan-pertemuan, Jepang menyatakan kesediaannya untuk berperanserta dalam ICM, dan mengusulkan pembentukan suatu badan (komite) internasional bagi rekonstruksi Kamboja. Tetapi Vietnam menolak keinginan itu, karena Jepang merupakan satu-satunya negara industri maju yang telah secara resmi mengakui kelompok perlawanan Kamboja (*Antara*, 6 Juli 1989). Jepang menegaskan bahwa: (1) langkah pertama yang harus dilakukan oleh komite itu adalah segera mengirimkan misi pencari fakta untuk mengetahui situasi ekonomi dan sektor-sektor tertentu di Kamboja yang sangat membutuhkan bantuan; (2) Jepang siap untuk mengadakan kerjasama seerat mungkin bagi pembangunan kembali ekonomi dan kawasan Indocina (Kamboja, Laos dan Vietnam) setelah penyelesaian politik di Kamboja tercapai; (3) Jepang juga bersedia berperanserta dalam pengembalian para pengungsi Kamboja melalui kerjasama dengan negara-negara yang berkepentingan dan organisasi internasional; (4) Jepang sepenuhnya mendukung sikap ASEAN mengenai Kamboja; (5) penarikan pasukan Vietnam sebaiknya dilakukan di bawah mekanisme pengawasan internasional yang efektif. Untuk ini perlu memanfaatkan PBB yang telah berpengalaman dan ahli masalah ini (*Antara*, 6 Juli 1989).

Hanoi dan Phnom Penh menentang kehadiran PBB karena organisasi dunia ini tidak mengakui pemerintah Phnom Penh dukungan Vietnam.

Menlu AS, James Baker, menyatakan bahwa AS dan ASEAN memiliki persamaan pandangan atas tiga masalah penting Kamboja, yakni: (1) penarikan mundur pasukan Vietnam yang terawasi; (2) pencegahan kembalinya dominasi Khmer Merah di Kamboja; dan (3) penentuan nasib sendiri rakyat Kamboja (*Antara*, 6 Juli 1989).

Seusai mengadakan tukar pikiran dengan Wakil Menlu Perancis, Ny. Edwige Avice, tanggal 7 Juli 1989, Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) pertemuannya dengan Wakil Menlu Perancis itu baru pada tahap mekanisme pengaturan pertemuan pleno, menetapkan

jumlah komisi kerja dan tugas-tugasnya serta berbagai hal yang mungkin diperlukan; (2) mengenai siapa yang akan ambil bagian dalam ICK belum dicapai kesepakatan final (*Kompas*, 8 Juli 1989).

4. Tentang Situasi di RRC

AS meminta kepada negara-negara ASEAN untuk tidak mengisolasi RRC sehubungan dengan peristiwa Tienanmen bulan Mei 1989.

Dalam pertemuannya tanggal 5 Juli 1989, Menlu Jepang dan Indonesia sepakat agar RRC tidak dikucilkan dari masyarakat internasional (*Antara*, 6 Juli 1989).

5. Keamanan Asia Tenggara

Pada tanggal 6 Juli, Menlu James Baker menegaskan bahwa AS berharap dan menginginkan Filipina untuk mempertahankan pangkalan militer AS di Clark (udara) dan Subic (laut) setelah tahun 1991.

6. Masalah Pengungsi

Menlu Jepang, Hiroshi Mitsuzuko, mengatakan di Bandar Seri Begawan tanggal 5 Juli 1989 bahwa Jepang bersedia menerima 1.000 orang pengungsi Vietnam untuk dimukimkan kembali di negaranya. Negeranya juga akan memberikan bantuan US\$11 juta kepada Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) untuk pemukiman kembali para pengungsi (*Antara*, 6 Juli 1989). Sebelumnya, pada tanggal 3 Juli 1989, Menlu Malaysia, Abu Hassan bin Omar, mendesak negara-negara Barat untuk mempercepat penerimaan para pengungsi Vietnam itu. Di samping itu ditegaskan pula bahwa ASEAN tetap menolak untuk menerima para pengungsi (*Antara*, 6 Juli 1989).

Wakil MEE, Juan Abel Matutes, menjelaskan pada awal pertemuan itu bahwa MEE menyediakan bantuan US\$6,16 juta untuk membantu pengungsi Indocina yang baru datang dari Vietnam. Dana itu untuk membiayai makanan, kesehatan dan tempat bernaung mereka di Indonesia, Malaysia, Filipina, Muangthai dan Hongkong (*Antara*, 7 Juli 1989).

Menurut UNHCR, kamp-kamp pengungsi di beberapa negara Asia Tenggara dan Hongkong pada bulan April 1989 dihuni oleh 71.935 orang manusia perahu Vietnam, dan diperkirakan sekitar 300.000 pengungsi Laos dan Khmer mencari penampungan sementara di Muangthai (*Antara*, 7 Juli 1989).

7. Hasil-hasil PMC

Kesepakatan bersama mengatakan: (1) kerjasama Asia-Pasifik perlu ditingkatkan, dan mereka sepakat untuk hadir dalam Pertemuan Canberra, bulan November 1989, untuk bertukar pikiran lebih lanjut. Australia akan mengundang mereka dan Korea Selatan untuk hadir pula; (2) perlu diupayakan agar ICK di Paris berhasil (*Antara*, 9 Juli 1989), dan penyelesaian politik secara menyeluruh di Kamboja untuk menghindari perang saudara di Kamboja. Dalam kaitan ini ASEAN juga menyatakan, mempunyai kepentingan untuk menyukseskan ICK, karena ICK itu akan diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pijakan-pijakan yang selama ini telah diusahakan oleh ASEAN; (3) penyelesaian politik secara menyeluruh di Kamboja itu juga meliputi pembentukan pemerintahan sementara empat faksi yang tidak didominasi oleh suatu faksi di Kamboja setelah penarikan mundur pasukan Vietnam, penghentian bantuan militer kepada kelompok-kelompok yang bertikai di Kamboja, pembentukan ICM untuk mengawasi pelaksanaan persetujuan damai serta pembentukan pasukan pemeliharaan perdamaian internasional (*Antara*, 10 Juli 1989).

Dalam suatu konperensi pers se usai PMC itu, Menlu Ali Alatas berusaha meluruskan persepsi wartawan yang selama ini berpendapat bahwa ASEAN memerlukan faktor lain yang dapat mempersatukannya, karena kesatuan langkah ASEAN selama ini disebabkan oleh munculnya masalah Kamboja. Masalah Kamboja itu hanya secara tiba-tiba memaksa ASEAN untuk memusatkan perhatiannya pada usaha penyelesaian itu. Jika masalah itu selesai, ASEAN akan kembali ke tujuan kerjasama semula secara penuh. ASEAN akan lebih berkembang dan tidak perlu khawatir ada perasaan asing di antara anggota-anggota ASEAN (*Antara*, 9 Juli 1989).

Setibanya di bandara Soekarno-Hatta tanggal 9 Juli 1989, Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa baik Indonesia maupun negara-negara ASEAN lainnya sangat berkepentingan agar ICK itu berhasil, karena konperensi itu tetap mendasarkan pada hasil-hasil yang telah dicapai oleh JIM maupun usaha-usaha lain yang telah ditempuh oleh ASEAN (*Kompas*, 10 Juli 1989). Menlu Ali Alatas juga menegaskan bahwa Indonesia selaku Ketua JIM dan Ketua Bersama dengan Perancis dalam ICK, akan terus berusaha menjembatani pihak-pihak yang berbeda pandangan atas beberapa masalah penting dan mendesak (*Antara*, 10 Juli 1989).

B. HUBUNGAN PERDAGANGAN ASEAN-AS

Asisten Menlu AS Urusan Asia Timur dan Pasifik, Richard Solomon, mengatakan kepada pers di Bangkok tanggal 29 Juni 1989 bahwa: (1) AS ingin mencapai konsensus untuk memperluas perdagangan dengan ASEAN; (2) AS akan menjaga perdagangan dunia bebas dan menghindari pembentukan blok perdagangan super; (3) Menlu AS, James Baker akan menghadiri pertemuan antara ASEAN dan mitra dialog di Brunei Darussalam untuk mengusahakan konsensus perdagangan dengan ASEAN itu (*Suara Karya*, 1 Juli 1989).

C. HUBUNGAN ASEAN-KANADA

1. Kerjasama Telekomunikasi Angkasa Luar ASEAN-Kanada

Di Bangkok tanggal 15 Juni 1989, Dirjen Departemen Pos dan Telekomunikasi Muangthai, Sombat Uthaisang, atas nama ASEAN dan Dubes Kanada untuk Muangthai, Lawrence A.H. Smith, menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU) kerjasama ASEAN-Kanada di bidang telekomunikasi angkasa luar.

Seusai penandatanganan, Dirjen Departemen Pos dan Telekomunikasi Muangthai itu mengatakan bahwa: (1) pemerintah Kanada akan menyediakan 10,75 juta Baht dan ahli teknik bagi ASEAN sebagai dukungan atas proyek itu; (2) ASEAN khawatir iklim hujan tropis dapat menyebabkan beberapa anggota ASEAN tidak dapat menggunakan "gelombang-gelombang KU" bagi satelit komunikasinya; (3) proyek ini berusaha mengadakan penelitian bersama Kanada-ASEAN untuk menentukan dapat tidaknya gelombang-gelombang frekuensi ini digunakan dalam satelit komunikasi di wilayah ASEAN; (4) proyek ini segera dapat dilaksanakan setelah cetak birunya selesai (*Antara*, 6 Juni 1989).

2. Peresmian Pusat ASEAN-Kanada

Sekembalinya menghadiri pertemuan para Menlu ASEAN dengan mitra dialognya di Brunei, Menlu Kanada, Joe Clark, melakukan kunjungan ke Singapura tanggal 10 Juli 1989 untuk membuka suatu Pusat Kanada-ASEAN. Tugas pusat itu adalah menyalurkan bantuan keuangan Kanada ke negara-negara anggota ASEAN (*Antara*, 10 Juli 1989).

Menlu Joe Clark mengatakan bahwa: (1) negaranya

akan memberikan bantuan keuangan S\$16 juta atau sekitar US\$8,2 juta kepada ASEAN untuk tahun 1989; (2) badan ini merupakan salah satu dari empat buah pusat yang dibentuk Kanada untuk menangani program-program bantuan pembangunan di negara-negara berkembang; (3) pusat ini akan mengelola program-program pendidikan, urusan umum, prakarsa kebudayaan dan pembinaan sumber daya manusia; (4) kepentingan timbal-balik di bidang pendidikan dan latihan harus dilayani seperti dalam rekanan bisnis baru yang sedang dikembangkan; (5) pembukaan pusat ini menandai dimulainya tahap baru hubungan kedua pihak, sehingga negaranya lebih terlihat di kawasan ASEAN; (6) badan ini akan menjadi pusat jaringan yang menghubungkan kelompok-kelompok kepentingan kedua belah pihak untuk saling meningkatkan pemahaman tentang bangsa dan kebudayaannya; (7) Kanada telah membantu proyek-proyek kehutanan, perikanan, telekomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN; (8) nilai perdagangan ASEAN-Kanada meningkat tiga kali lipat, pada tahun 1988 menjadi US\$2,6 milyar atau meningkat 33% dari angka perdagangan tahun 1987 (*Antara*, 10 Juli 1989).

D. HUBUNGAN ASEAN-SELANDIA BARU

1. Kunjungan Misi Perdagangan Selandia Baru ke Indonesia

Misi Perdagangan Selandia Baru yang dipimpin oleh Sir John Mowbray berada di Indonesia tanggal 6-8 Juni 1989 untuk mengadakan pertemuan dengan para pengusaha Indonesia dan sekaligus menghadiri Pertemuan Komite Eksekutif Dewan Pengusaha ASEAN-Selandia Baru di Bali.

Pada acara jamuan makan di Hotel Mandarin tanggal 5 Juni 1989 Sir John Mowbray mengatakan: (1) pada umumnya masyarakat Selandia Baru tidak menyadari perkembangan lingkungan ekonomi dan bisnis di Indonesia yang semakin positif; (2) para pengusaha di negaranya mulai menyadari adanya kesempatan-kesempatan penting untuk mengadakan perdagangan dan investasi di Indonesia; (3) pertemuan misinya dengan para pengusaha Indonesia telah diatur oleh Badan Pengembangan Perdagangan Selandia Baru di Jakarta; (4) misi perdagangan ASEAN yang berkunjung ke negaranya, April 1989, telah melihat teknologi penanaman tanaman dan pengolahan pangan serta pengepakan. Misi perdagangan itu menilai bahwa pendekatan langsung sangat bermanfaat dan akan lebih memperkokoh hu-

bungan Selandia Baru-ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 6 Juni 1989).

2. Kunjungan Ali Alatas ke Selandia Baru

Menlu Ali Alatas berada di Selandia Baru minggu ketiga Juni 1989.

Menlu Selandia Baru, Russell Marshall, mengatakan kepada pers di Wellington tanggal 20 Juni 1989 bahwa: (1) kunjungan Menlu Ali Alatas ke Selandia Baru itu akan membahas perkembangan di Kamboja dan perdagangan ASEAN dengan mitra dialognya; (2) banyak masalah internasional yang dapat didiskusikan secara lebih mendalam dalam pertemuan itu; (3) tindakan tegas militer Cina terhadap gerakan pro-demokrasi di Beijing diharapkan dapat dibahas dalam pertemuan itu; (4) kunjungan yang bertepatan waktunya dengan berlangsungnya dialog ASEAN-Selandia Baru, diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan menjelang pertemuan para Menlu ASEAN di Brunei, Juli 1989; (5) Indonesia di masa mendatang dapat memainkan peranan penting, karena Indonesia selain mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan juga sebagai negara yang dituakan di Asia Tenggara; (6) jika Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan pembangunannya secara berkesinambungan pada dekade mendatang, negara ini akan diperhitungkan bukan saja di bidang ekonomi tetapi juga di bidang politik (*Jakarta Post*, 21 Juni 1989).

E. HUBUNGAN ASEAN-AUSTRALIA

1. Pertemuan Panitia Kerja Kelautan ASEAN-Australia ke-7

Pertemuan Panitia Kerja Kelautan ASEAN-Australia ke-7 berlangsung di Yogyakarta tanggal 20-23 Juni 1989 diikuti oleh 12 orang utusan untuk membahas penelitian kelautan, khususnya hutan bakau dan karang (*Antara*, 21 Juni 1989).

Seorang utusan dari Indonesia, Dr. Otto S.R. Ongkosongo, mengatakan kepada *Antara* di Yogyakarta tanggal 23 Juni 1989 bahwa: (1) pertemuan ke-7 ini merupakan pertemuan terakhir tahap pertama untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek penelitian yang telah dilakukan, sekaligus membahas rencana kerja tahap kedua; (2) obyek penelitian ditujukan pada terumbu karang, komunitas ikan karang, rumput laut, serta komunitas *mengrove* dan *biota substrat* lunak; (3) lokasi pe-

nelitian di Indonesia meliputi kawasan Kepulauan Seribu, Grajagan di Jawa Tengah dan Ujung Kulon di Jawa Barat; (4) panitia ini berusaha meningkatkan kualitas tenaga peneliti melalui kursus latihan dan program sarjana; (5) panitia kerja ini merupakan wujud kerjasama negara-negara ASEAN-Australia untuk menangani wilayah pesisir yang makin terancam kelestarian sumber daya perairannya; (6) kemudahan-kemudahan yang ada di wilayah pesisir, menyebabkan kawasan ini dimanfaatkan secara besar-besaran untuk berbagai keperluan, seperti kawasan industri, daerah pemukiman, pertambakan ikan dan pertanian; (7) sekitar 75% kota-kota besar di Indonesia yang berpenduduk di atas 100.000 jiwa berkembang di daerah pesisir. Hal ini mengakibatkan kelestarian sumber daya perairan pantai terancam; (8) pencemaran laut dapat menyebar tanpa menghiraukan batas-batas teritorial suatu negara, oleh karena itu apa yang dirasakan sebagai ancaman Indonesia tentu juga dirasakan oleh negara-negara ASEAN tetangganya; (9) pelaksanaan proyek penelitian ini dibagi dalam dua tahap, tahap pertama tahun 1984-1989 dan tahap kedua tahun 1989-1994; (10) melalui proyek ini akan terus dikembangkan kemampuan ilmiah dan keahlian teknis di setiap negara anggota ASEAN agar dapat mengelola sumber daya wilayah pesisir (*Antara*, 24 Juni 1989).

2. Masalah Kerjasama Ekonomi Pasifik

Menlu Ali Alatas mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 29 Juni 1989 bahwa: (1) untuk sementara ini Indonesia sependapat dengan analisa Australia mengenai perkembangan perekonomian internasional, khususnya yang berdampak terhadap Cekung Pasifik. Selain itu Indonesia juga sependapat bahwa sudah waktunya bagi negara-negara di kawasan ini untuk meningkatkan analisa dan konsultasi pada tahap yang lebih formal; (2) wadah konsultasi resmi bagi ASEAN adalah *six plus five* atau lima tambah satu; (3) gagasan PM Australia Bob Hawke untuk membentuk kerjasama ekonomi di Pasifik selain akan dibicarakan para Menlu ASEAN yang belum sempat membicarakannya secara formal bersama, juga perlu dibicarakan lagi dengan Australia dan dengan para mitra dialog ASEAN lainnya; (4) usul Menlu AS James Baker untuk membicarakan mekanisme kerjasama ekonomi di Pasifik merupakan salah satu tanggapan terhadap usul Australia, karena masih ada yang mempunyai pandangan yang lebih luas (*Suara Pembaruan*, 30 Juni 1989).

Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Australia, Richard Woolcott, mengatakan kepada *Antara*

di Canberra tanggal 6 Juli 1989 bahwa: (1) negaranya tidak kecewa dengan sikap hati-hati ASEAN terhadap usul kerjasama ekonomi Asia-Pasifik; (2) Indonesia sepenuhnya setuju dengan gagasan Pertemuan Canberra, tetapi mempertanyakan negara-negara Asia-Pasifik mana yang harus menghadiri pertemuan itu; (3) Indonesia setuju untuk hadir, tetapi mengingatkan agar hasil pertemuan itu tidak ditentukan terlebih dahulu; (4) Malaysia tidak ingin kerjasama itu berkembang menjadi blok perdagangan atau suatu lembaga baru, oleh karena itu lebih baik memanfaatkan perangkat yang sudah ada yaitu ASEAN; (5) Muangthai menghendaki, segala tindakan yang akan mengeruhkan peranan ASEAN harus dihindarkan; (6) seluruh anggota ASEAN mendukung gagasan Pertemuan Tingkat Menteri Asia-Pasifik di Canberra, November 1989, untuk membahas usul PM Bob Hawke itu; (7) dukungan ASEAN memainkan peranan kunci bagi terwujudnya gagasan Bob Hawke; (8) negaranya tidak mencari posisi memimpin, melainkan hanya sebagai penyaring untuk mengembangkan dukungan bagi kerjasama kawasan yang lebih luas; (9) negaranya sangat menghargai keberhasilan ASEAN dalam kerjasama regional; (10) kini saat yang paling tepat untuk mengembangkan kerjasama yang lebih luas berdasarkan sukses ASEAN; (11) gagasan kerjasama Asia-Pasifik bukan merupakan reaksi atau sikap bermusuhan terhadap rencana pembentukan pasar tunggal Eropa tahun 1992; (12) Australia benar-benar ingin melihat hari depannya di Asia dan Pasifik Barat (*Angkatan Bersenjata*, 9 Agustus 1989).

F. HUBUNGAN ASEAN - KOREA SELATAN

1. Tawaran Korea Selatan Sebagai Mitra Dialog

Menteri Perdagangan Muangthai, Subin Pinkayan, mengatakan kepada pers di Bangkok tanggal 23 Juni 1989 bahwa: (1) Korea Selatan menawarkan diri untuk berpartisipasi dalam kegiatan ASEAN sebagai mitra dialog sektoral; (2) Komite Kebijakan Hubungan Perdagangan Internasional Muangthai pada prinsipnya setuju atas relevansi Korea Selatan sebagai mitra dialog itu; (3) tawaran itu akan dibahas secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri Ekonomi dan Luar Negeri ASEAN tanggal 3-4 Juli 1989 di Brunei Darussalam; (4) ASEAN ingin meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, penanaman modal dan industri pariwisata dengan Korea Selatan; (5) meskipun secara bilateral Korea Selatan telah meningkatkan hubungan ekonomi

dan politik dengan anggota-anggota ASEAN, tetapi negara itu tidak mempunyai hubungan resmi dengan ASEAN sebagai kelompok; (6) pencalonan Korea Selatan sebagai mitra dialog sektoral ASEAN pada saat ini tidak akan memperkuat kesempatannya untuk memperoleh status menjadi mitra dialog penuh; (7) ASEAN enggan memberikan status mitra dialog penuh kepada Korea Selatan karena alasan politik yang berkaitan dengan situasi khusus di Semenanjung Korea (*Antara*, 24 Juni 1989).

Menlu Ali Alatas mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 29 Juni 1989 bahwa: (1) para Menlu ASEAN akan mengambil keputusan penting mengenai pembukaan hubungan sektoral ASEAN-Korea Selatan pada pertemuan di Brunei mendatang, karena persiapannya telah dibahas oleh panitia tetap ASEAN; (2) pembukaan hubungan ini merupakan salah satu kebijaksanaan baru ASEAN, yang merupakan pelaksanaan keputusan KTT ASEAN di Manila 1987 (*Antara*, 29 Juni 1989).

2. Pertemuan Komite Kerjasama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan

Pertemuan Komite Kerjasama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan ke-8 berlangsung di Jakarta tanggal 7 Juli 1989 untuk membahas masalah perdagangan, investasi dan industri.

Menteri Perdagangan Arifin Siregar mengatakan pada pembukaan sidang itu bahwa: (1) membaiknya iklim investasi di Indonesia telah meningkatkan investasi asing, khususnya dari Korea Selatan; (2) ekspor Indonesia ke Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh naik turunnya ekspor migas ke negara itu, sehingga menunjukkan gerakan yang fluktuatif karena perubahannya dari tahun ke tahun cukup tajam; (3) meskipun ekspor non-migas Indonesia ke Korea Selatan selalu meningkat, tetapi nilainya belum terlalu besar (*Merdeka*, 6 Juli 1989).

Menteri Perdagangan dan Industri Korea Selatan, Seung Soo Han, mengatakan antara lain: (1) ASEAN dan Korea Selatan mempunyai kepentingan vital untuk membangun kerangka perdagangan bilateral yang lebih kuat; (2) diterimanya Korea Selatan sebagai mitra dialog ASEAN akan memperluas pandangan-pandangan untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua pihak; (3) Indonesia mempunyai pengaruh yang besar, baik di ASEAN maupun di Asia Tenggara; (4) setiap kerangka atau skema kerjasama regional harus mendapatkan dukungan dari Indonesia, bila konsep itu diha-

rapkan berhasil; (5) ASEAN dan Korea Selatan sama-sama negara berkembang, yang juga mempunyai kepentingan serupa pada negara maju, terutama mengenai proteksionisme (*Merdeka*, 6 Juli 1989).

3. Sistem Kerjasama ASEAN-Korea Selatan

Dalam siaran pers tanggal 8 Agustus 1989, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa suatu delegasi ASEAN yang berjumlah 12 orang dan dipimpin Dirjen Deplu Indonesia, Husni Thamrin Pane, akan berkunjung ke Seoul tanggal 20-21 Agustus 1989 untuk membahas pembentukan sistem kerjasama Korea Selatan-ASEAN yang telah disepakati oleh para Menteri ASEAN di Brunei tanggal 4 Juli 1989 (*Antara*, 9 Agustus 1989).

G. HUBUNGAN ASEAN-MEE

1. Seminar ASEAN-Eropa

Seminar ASEAN-Eropa 1992, Implikasi dan Jawabannya, berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 10-11 Juli 1989, dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah yang menangani masalah perdagangan luar negeri, para industriawan dan pengamat ekonomi dari ASEAN dan Eropa untuk membahas: (1) dampak pembentukan pasar tunggal Eropa 1992 bagi ASEAN; (2) masalah pasar tunggal Eropa dan dinamisme baru di masyarakat Eropa; (3) masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan perdagangan negara-negara ASEAN.

Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia, Rafidah Aziz, mengatakan pada pembukaan seminar itu bahwa: (1) pertemuan ASEAN-MEE di Dusseldorf, Mei 1988, menyetujui pembentukan suatu gugus kerja untuk mengidentifikasi kendala-kendala penanaman modal MEE di ASEAN; (2) jumlah penanaman modal MEE pada tahun 1984 menempati urutan ketiga setelah Jepang dan AS, yakni MEE 19%, Jepang 27% dan AS 21%; (3) penanaman modal MEE yang kian meningkat di ASEAN bukan hanya sebagai kunci strategi jangka panjang untuk meningkatkan hubungan dagang yang saling menguntungkan, tetapi juga meningkatkan alih teknologi dan memperkuat hubungan kedua pihak; (4) perundingan ASEAN-MEE selanjutnya akan diselenggarakan di Manila Desember 1989 (*Antara*, 11 Juli 1989).

Ketua delegasi MEE, Abel Matutes Juan, mengatakan bahwa: (1) masalah inflasi, pengangguran dan per-

tumbuhan ekonomi yang rendah yang dihadapi MEE pada akhir dekade 1970-an dan awal 1980-an merupakan prinsip dasar pembentukan pasar tunggal Eropa; (2) MEE ingin mengadakan pembicaraan secara terbuka mengenai gagasan pembentukan kerjasama ekonomi Asia-Pasifik; (3) pembentukan kerjasama seperti itu hendaknya terbuka bagi kegiatan perdagangan dunia (*Jakarta Post*, 11 Juli 1989).

Menteri Muda Perdagangan Indonesia, Dr. Sudradjad Djiwandono, mengatakan: (1) ASEAN harus meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi pengaruh pasar tunggal Eropa; (2) perubahan dan penyesuaian kondisi sekarang telah menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang menggairahkan bagi penanaman modal; (3) kestabilan politik, komitmen dasar fiskal dan keuangan yang bijaksana serta kemudahan persyaratan dan pengurangan birokrasi telah menjadikan ASEAN memiliki daya tarik bagi para investor dan sekaligus menjadi mitra usaha yang dapat dipercaya; (4) Eropa terlalu memandang kepentingan internnya dan menganggap peluang penanaman modal di kawasan ASEAN tidak menggairahkan, oleh sebab itu investasi Eropa di kawasan ini sulit meningkat; (5) sikap Eropa itu juga merupakan penyebab dasar timbulnya proteksionisme yang sangat ditentang oleh negara-negara berkembang; (6) ASEAN masih memerlukan kehadiran para pengusaha Eropa dan juga siap menyambut partisipasi mereka; (7) ASEAN tidak dapat membayangkan berlakunya suatu sistem perdagangan dunia yang terbuka tanpa ikutsertanya masyarakat Eropa; (8) terwujudnya sistem perdagangan seperti itu hanya akan membahayakan sistem perdagangan terbuka dunia, karena pasaran terbuka Eropa memegang peran penting dalam pelaksanaan sistem perdagangan dunia tersebut; (9) penarikan Eropa dari kawasan ASEAN tidak akan menguntungkan kedua pihak dan kawasan Pasifik pada umumnya; (10) ASEAN merupakan kawasan yang dinamis dan akan menjadi rekan yang menguntungkan bagi perdagangan masa depan Eropa serta menjadi tempat investasi yang aman (*Antara*, 11 Juli 1989).

2. Kunjungan Parlemen Eropa ke Indonesia

Ketua delegasi Parlemen Eropa, Dr. Egon Klepsch, yang sedang berkunjung ke Indonesia mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 28 Juni 1989 bahwa: (1) tidak ada alasan atau dasar bagi Indonesia untuk mengkhawatirkan rencana pembentukan pasar tunggal Eropa; (2) pada tanggal 1 Januari 1993 Masyarakat Eropa sudah tidak mengenal batas-batas negara; (3) pembed-

tukan pasar tunggal pada hakikatnya hanya untuk menghapuskan bea terhadap beberapa komoditi yang saat ini masih dikenakan; (4) pembentukan pasar tunggal Eropa akan membawa keuntungan dan manfaat yang lebih besar bagi mitra MEE; (5) MEE akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mitra mereka untuk memasuki pasaran Eropa; (6) melalui pasar tunggal Eropa diharapkan perdagangan masyarakat Eropa dengan semua mitra dagangnya, termasuk ASEAN, akan dapat berjalan lebih lancar.

Prof. Dr. Gunter Rinsche mengatakan bahwa: (1) proteksionisme bukan hanya akan menghancurkan perdagangan internasional tetapi juga perdagangan internasional Eropa dengan ASEAN serta mitra dagang lainnya; (2) pembentukan pasar tunggal Eropa diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat Eropa dan memberikan kesempatan masyarakat Eropa untuk membeli barang-barang dari ASEAN; (4) MEE sedang membicarakan bahaya yang timbul akibat tindakan beberapa industri tertentu Eropa untuk melakukan percobaan proteksi terhadap produk industri tertentu mereka. Masalah ini akan segera diselesaikan, khususnya yang berkaitan dengan ASEAN, karena MEE mempunyai hubungan yang dekat dan memiliki informasi yang cukup tentang hubungan Eropa-ASEAN; (5) pasar tunggal Eropa merupakan model untuk mengembangkan pasar dunia (*Suara Pembaruan*, 29 Juni 1989).

3. Implikasi Pasar Tunggal Eropa Terhadap ASEAN

Dr. Rolf J. Langhammer dari Lembaga Pengkajian Asia Tenggara pada Institut Ekonomi Internasional di Kiel, Jerman Barat mengatakan kepada anggota perkumpulan ekonomi Indonesia-Jerman Barat di Jakarta tanggal 10 Agustus 1989 bahwa: (1) dengan beroperasinya pasar tunggal Eropa (PTE), tahun 1992, impor barang-barang manufaktur masyarakat Eropa dari negara-negara berkembang, termasuk ASEAN, diperkirakan meningkat sampai 5% atau senilai \pm US\$2 milyar; (2) pelaksanaan pasar tunggal Eropa nanti hampir bersamaan dengan empat peristiwa besar yang akan menghasilkan keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan perdagangan internasional bagi negara-negara berkembang yakni: (a) penyelesaian putaran Uruguay yang dijadwalkan akan terlaksana menjelang akhir tahun 1990; (b) pembaruan sistem Preferensi Umum (GSP) setelah tahun 1990; (c) prinsip-prinsip perdagangan tekstil dan pakaian jadi setelah masa berlakunya Persetujuan Multi Serat (MFA) IV tahun 1991; (d) Konvensi Baru Lome 1990; (e) semua peristiwa itu akan ikut menentukan perubahan-perubahan dalam harga

relatif antara suplai domestik dan impor masyarakat Eropa dari negara-negara berkembang; (5) pasar tunggal Eropa dapat mendorong peningkatan pertumbuhan dan perubahan struktural dalam perspektif internasional; (6) negara-negara berkembang dapat mengambil manfaat dari kekuatan-kekuatan ekonomi baru yang menonjol, baik sebagai pemasok maupun sebagai pembeli barang, jasa dan teknologi yang kompetitif; (7) jika dilakukan deregulasi, diperkirakan akan terjadi perkembangan yang cukup di sektor perdagangan jasa. Hal ini akan berpengaruh pada elastisitas pendapatan yang dapat mendorong peningkatan jasa menjadi lebih besar daripada barang; (8) perkembangan perdagangan jasa yang cukup akan meningkatkan permintaan masyarakat Eropa pada jasa-jasa yang sudah disediakan oleh negara-negara berkembang, seperti pariwisata dan angkutan konstruksi; (9) beberapa negara berkembang yang memiliki daya saing yang kuat di sektor maritim dan angkutan udara perlu melakukan pendekatan-pendekatan bilateral agar memperoleh pangsa pasar di PTE; (10) hambatan-hambatan komoditi perlu segera dihapuskan sehingga daya saing produk pertanian dari negara berkembang dapat ditingkatkan; (11) ASEAN mempunyai kemampuan kolektif untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di PTE; (13) kemampuan ASEAN melakukan penyesuaian setelah tahun 1992 diperkirakan akan diperlancar oleh peningkatan permintaan impor dari MEE (*Merdeka*, 12 Agustus 1989).

H. HUBUNGAN ASEAN-ASIA PASIFIK

1. Posisi ASEAN dalam Percaturan Politik Asia-Pasifik

Seminar Posisi ASEAN dalam Percaturan Politik di Asia-Pasifik yang diselenggarakan oleh *International Forum Indonesia*, dan dihadiri oleh para diplomat dari dalam dan luar negeri, politisi dan peminat masalah hubungan internasional berlangsung di Jakarta tanggal 5 Juni 1989.

Dalam makalahnya yang berjudul *Perubahan Peta Politik di Asia-Pasifik*, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa: (1) masalah Kamboja telah memperkuat persatuan dan meningkatkan profil ASEAN di forum internasional; (2) ASEAN harus mencari titik-temu dan tumpuan kerjasama baru setelah masalah Kamboja berhasil diselesaikan agar momentum yang telah dicapai sekarang ini dapat dipertahankan; (3) tantangan yang dihadapi ASEAN di masa men-

datang adalah tidak lagi menggalang sikap bersama menghadapi suatu ancaman dari luar, tetapi penggalangan kebersamaan sikap politik yang mempersatukan; (4) pertemuan para Menlu ASEAN ke-22 di Brunei, Juli 1989, diharapkan mencapai persetujuan untuk mengadakan dialog dengan negara-negara Pasifik dalam bentuk baru, dan hasil pertemuan tahunan ke-17 tahun 1984 dapat diaktifkan kembali; (5) pada pertemuan tahunan ke-18, ASEAN gagal mencapai persetujuan untuk mengadakan dialog dengan negara-negara Pasifik dalam bentuk baru, karena Malaysia menolak untuk mendukung gagasan semacam itu; (6) prakarsa yang telah tertunda empat tahun itu sangat sayang bila tidak diambil kembali oleh ASEAN, karena kerjasama Asia-Pasifik itu dapat menjadi suatu hal yang sangat mendesak; (7) gagasan PM Australia, Bob Hawke, untuk membentuk forum konsultasi di antara negara-negara Asia-Pasifik dapat menjadi cambuk bagi ASEAN untuk mengatasi perbedaan-perbedaan kecil yang pernah ada dan meraih kembali kesempatan untuk mengadakan forum dialog ASEAN-Pasifik; (8) sudah waktunya dipikirkan untuk melaksanakan dialog para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dengan negara-negara Pasifik; (9) format dialog 6 + 5 + 1 sudah ketinggalan zaman dan kurang sesuai dengan prestise ASEAN yang sudah meningkat saat ini, karenanya harus diubah menjadi 6 + 5 atau enam negara ASEAN dengan lima negara mitra dialog Pasifik secara bersama-sama; (10) untuk menghadapi perkembangan Asia-Pasifik akhir-akhir ini, Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara harus memilih mitra yang paling tepat di antara empat negara besar di kawasan Asia-Pasifik untuk membantu pertumbuhan ekonomi, perdagangan luar negeri dan pembangunan; (11) Jepang dan AS merupakan negara-negara yang dapat membantu perdagangan dan mendukung pembangunan ekonomi secara berlanjut di kawasan Asia-Pasifik; (12) pemilihan Jepang dan AS samasekali tidak dilatarbelakangi oleh alasan ideologi, melainkan karena parahnya keadaan ekonomi RRC dan Uni Soviet (*Kompas*, 6 Juni 1989); (13) ada tiga tahapan perubahan peta politik di Asia-Pasifik, yakni: (a) nasionalisme yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia; (b) munculnya komunisme; (c) perubahan yang mendasar dalam sistem ekonomi, politik dan sosial di negara-negara komunis; (14) kejadian-kejadian di Uni Soviet, RRC dan negara komunis lainnya sangat mengurangi kredibilitas sistem komunis, sehingga ideologi tidak lagi merupakan faktor penting dalam percaturan politik dunia; (15) beberapa tahun mendatang, negara-negara komunis akan lebih disibukkan dengan urusan dalam ne-

gerinya, hal ini berarti akan mengurangi kegiatan mereka untuk mencampuri urusan negara lain yang non-komunis dan membawa keterbatasan senjata sebagai alat politik luar negeri mereka; (16) AS merupakan mitra perdagangan dan investasi yang sangat penting bagi negara-negara Asia Tenggara, terutama ASEAN, karena negara ini sampai sekarang masih merupakan pasaran yang paling liberal kalau dibandingkan dengan pasaran negara lain (*Suara Pembaruan*, 9 Juni 1989).

Dr. Juwono Sudarsono mengatakan: (1) kerjasama regional berdasarkan pada konvergensi politik, kedekatan geografik dan keunggulan komparatif, yang secara bersama atau sendiri-sendiri dapat saling mendukung dan mengisi serta memperkuat kerjasama; (2) kerjasama yang langgeng dan mantap mensyaratkan adanya persepsi strategik yang sama dan pemanfaatan jarak sebagai unsur penting dalam bertetangga; (3) pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membuat pudarnya konsep ideologi dalam hubungan internasional, dan memperkecil jarak bagi transaksi dagang dan usaha niaga serta mempengaruhi kerjasama intra-regional; (4) dari semula kerjasama ASEAN lebih bersifat saling bersaing daripada saling mengisi dan memperkuat, karenanya di tahun 1990-an kerjasama politik ASEAN harus lebih didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman sistem politik dan pemerintahan yang lebih mendalam di antara sesama anggotanya; (5) jika ASEAN lahir pada zaman pembendungan komunisme, maka pada 1990-an ASEAN ditantang untuk membendung kemiskinan, perusakan lingkungan dan pecahnya perang; (6) membangun rasa percaya di antara sesama anggota dan antara bangsa merupakan tantangan ASEAN di masa mendatang; (7) Indonesia mempunyai posisi sentral dan pergantian pimpinan nasional tahun 1993 merupakan tonggak sejarah bagi kerjasama politik ASEAN; (8) Indonesia perlu memusatkan perhatian untuk mempersiapkan tenaga ahli mengenai sejarah kerjasama ASEAN, terutama yang menyangkut geo-politik; (9) makin besar peranan kerjasama ekonomi, ilmu dan pengetahuan, hakikat kerjasama regional makin dipengaruhi oleh faktor-faktor lintas benua yang sering bersifat trans-ideologi (*Suara Pembaruan*, 6 September 1989).

Mantan Wakil PM RI, Hardi SH mengatakan bahwa: (1) adanya polarisasi kekuatan komunis di Indocina dan non-komunis di ASEAN seharusnya dilenyapkan; (2) meskipun Uni Soviet melaksanakan keterbukaan dan restrukturisasi, tetapi dia tidak akan melepaskan pengaruhnya yang telah ditanamkan di Vietnam; (3) AS bertekad untuk mempertahankan keberadaannya di Fi-

lipina dan menjalin hubungan baik dengan ASEAN; (4) keamanan dan stabilitas kawasan ini sangat erat hubungannya dengan perimbangan kekuatan dan keamanan dunia (*Pelita*, 6 Juni 1989).

Berkaitan dengan masalah itu, Dr. C.P.F. Luhulima mengatakan di Gedung Merdeka Bandung tanggal 24 Juni 1989, bahwa: (1) pertarungan mengenai kepemimpinan dalam berbagai forum dunia akan sangat kuat mempengaruhi perekonomian ASEAN dan negara-negara lain di Asia-Pasifik; (2) stabilitas dan keamanan negara-negara ASEAN yang didukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan akan mengalami berbagai gangguan, sehingga akan mendestabilisasikan ketahanan nasional dan ketahanan regional ASEAN; (3) usaha AS untuk mengurangi ketegangan ekonomi dengan Jepang akan dilakukan dengan ekspansi ekspor dan pengurangan pengeluaran negara, termasuk militer; (4) ekspansi ekspor AS akan mendesak Jepang, negara-negara industri baru, ASEAN dan Australia. Usaha ini bertujuan membuka pasar mereka lebih besar lagi. Tindakan semacam ini dapat memaksa negara-negara itu untuk mencari pasar ekspor alternatif atau mengandalkan permintaan di dalam negeri; (5) dalam tahun-tahun mendatang andalan utama bagi negara anggota ASEAN masih tetap diversifikasi ekspor, tetapi pengalihan tujuan ekspor ASEAN dari AS ke Jepang, negara industri baru dan MEE hanya dapat dilakukan secara bertahap, karena masih memerlukan banyak penyesuaian; (6) AS masih tetap merupakan pasar ekspor ASEAN yang paling besar dan sumber impor kedua terbesar setelah Jepang; (7) ASEAN harus bersama-sama mengembangkan suatu strategi pemasaran yang memadai untuk memasuki pasar Eropa, apalagi setelah terbentuknya pasar tunggal Eropa yang sangat kompetitif sifatnya; (8) selain pasar Eropa, ASEAN perlu memberikan perhatian yang lebih besar pada pasar-pasar Jepang dan negara industri baru, karena negara-negara itu secara geografis lebih dekat; (9) diversifikasi tujuan ekspor tidak akan menyelesaikan ketegangan ekonomi Jepang-AS dan justru dapat membuat destabilitas kawasan Asia-Pasifik; (10) ASEAN dapat memberikan sumbangannya dalam pertemuan para Menlu ASEAN dengan mitra dagangnya dalam bentuk 6 + 1 dan 6 + 5 di Brunei bulan Juli 1989 untuk mendekatkan kedua pihak yang sedang perang dagang. Pertemuan ini penting untuk mencari jalan keluar dari perselisihan perdagangan dan keuangan demi kepentingan negara-negara Asia-Pasifik; (11) pemusatan perhatian pada pola keamanan, stabilitas dan pengeluaran militer akan makin terdesak oleh pola keamanan, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan yang sejak semula mendasari

kerjasama ASEAN; (12) kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan masa depan, selain mendatangkan pertumbuhan perdagangan dan pendapatan yang cepat, juga akan menimbulkan pertentangan kepentingan, khususnya antara kedua adikuasa ekonomi di wilayah ini; (13) ketegangan yang telah mulai memuncak ialah perselisihan AS dengan Jepang dan negara industri baru, karena defisit rangkap AS di bidang perdagangan dan pembayaran (*Suara Pembaruan*, 26 Juni 1989).

2. Pertemuan Meja Bundar Asia-Pasifik ke-3

Pertemuan Meja Bundar Asia-Pasifik ke-3 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 17-18 Juni 1989, dihadiri oleh 150 orang peserta dari 23 negara untuk membahas hubungan Amerika Serikat-Uni Soviet yang sedang mereda, pemulihan hubungan RRC-Uni Soviet, perang dingin Soviet-Jepang, Sino-Vietnam, pertikaian Korea, Kampuchea dan Asia Tenggara.

PM Malaysia, Mahathir Mohammad, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu: (1) negara-negara besar tidak boleh menganggap remeh peranan negara kecil untuk memberikan sumbangannya pada perdamaian dunia, misalnya negara-negara kecil yang terbagung dalam ASEAN telah dan akan terus berusaha menciptakan keamanan sepenuhnya di kawasan Asia Tenggara; (2) ASEAN yang berasal dari sekumpulan negara yang berbeda-beda, telah berkembang menjadi sebuah masyarakat yang bersendikan pada saling pengertian, saling percaya dan kerjasama aktif yang semuanya itu belum pernah terjadi dalam sejarah Asia Tenggara; (3) negara-negara Asia Tenggara agar menghilangkan rasa saling curiga dan kesalahpahaman, karena hal itu tidak akan menguntungkan; (4) demi kepentingan Asia Tenggara, diperlukan pertimbangan tenaga yang sehat dan satu sistem yang terbuka agar negara-negara di kawasan ini dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi, dinamika sosial, persatuan dan keamanan politik; (5) semua negara besar, termasuk negara-negara Eropa Barat dan Asia Timur, perlu melihat langsung ke Asia Tenggara agar mereka dapat melaksanakan peranan yang membangun dan memberikan manfaat bagi semua pihak; (6) tujuan mengubah Indocina dari medan pertempuran menjadi sebuah pasaran, mungkin tidak akan terwujud karena banyak tergantung pada penarikan tentara Vietnam dari Kamboja; (7) ASEAN harus bersedia melaksanakan peranan yang benar-benar dapat menghilangkan hambatan-hambatan dan dapat mewujudkan negara Kamboja yang merdeka, netral dan aman; (8) bila dasar penghapusan suatu bangsa kembali muncul, hal itu akan menjadi satu

tragedi bagi Kamboja, karenanya segala usaha perlu dilakukan untuk mencegah meletusnya perang saudara di negeri itu (*Antara*, 18 Juni 1989).

Sementara itu Wakil Menlu Vietnam, Tran Quang Co, mengatakan bahwa: (1) negara-negara di Asia Tenggara perlu untuk menyingkirkan rasa kurang percaya, kecurigaan dan persaingan di antara sesama mereka agar dapat menjamin perdamaian dan stabilitas kawasan ini; (2) selama rasa kurang percaya masih ada di dalam suasana politik kawasan ini, mungkin konfrontasi regional akan tetap ada; (3) negara-negara Asia Tenggara perlu menyatukan usaha-usaha untuk menjamin pertumbuhan yang kuat dan mantab serta menolak setiap pencemaran dari lingkungan politik internasional; (4) kerjasama ekonomi antar negara-negara Asia Tenggara hendaknya ditingkatkan, karena ketergantungan antar negara merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan; (5) peredaan ketegangan dan tindakan-tindakan negara adikuasa untuk mengakhiri masalah Kamboja telah menciptakan kondisi yang tepat untuk mewujudkan ZOPFAN; (6) normalisasi hubungan di antara negara-negara besar telah menciptakan rasa percaya diri yang semakin besar di negara-negara yang lebih kecil dalam penyesuaian kembali kebijaksanaan politik mereka (*Angkatan Bersenjata*, 20 Juni 1989).

3. Jepang dan Masa Depan Asia Tenggara

Seminar yang bertema Jepang dan Masa Depan Asia Tenggara: Ancaman atau Peluang, berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 26 Juni 1989 diikuti antara lain oleh Dr. Noordin Sopiee, Wakil Menlu Vietnam, Tran Quang Co, Ketua Program Yayasan Keamanan Jepang, Dr. Kazuo Takahashi dan Pimpinan Redaksi Jakarta Post, Sabam Siagian.

Dr. Noordin Sopiee mengatakan bahwa: (1) walaupun terdapat pertikaian, tetapi terdapatnya saling pengertian yang lebih baik menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara lebih banyak menganggap Jepang sebagai satu peluang daripada ancaman; (2) setiap negara dapat menjadi ancaman bila menyalahgunakan negara itu, atau karena terlalu bodoh dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh; (3) walaupun terdapat keraguan dan kecurigaan pada masa lampau, umumnya negara Asia Tenggara kini percaya bahwa Jepang bersedia membantu negara berkembang sebagai *Godfather* yang baik daripada tuan rumah yang agresif.

Wakil Menlu Vietnam, Tran Quang Co, mengatakan antara lain: (1) Jepang harus tahu bentuk hubungan

yang baru dan bermanfaat bagi kedua belah pihak; (2) munculnya Jepang sebagai raksasa ekonomi memberi manfaat terutama kepada Vietnam yang sangat memerlukan investasi asing dan alih teknologi maju; (3) saat ini Jepang merupakan sumber bantuan yang dapat menggerakkan pembangunan di negara-negara Asia Tenggara; (4) negaranya tidak setuju dengan ide *Pax Nipponca* atau Jepang sebagai negara nomor 1 di Asia Tenggara dan berharap ASEAN lebih baik menganekaragamkan hubungan dengan negara maju lainnya.

Sabam Siagian mengatakan antara lain: (1) ada keyakinan yang lebih mendalam bahwa Jepang bersedia membantu negara berkembang; (2) bagi Jepang akan lebih bermanfaat jika kawasan ASEAN makmur dan stabil, karena merupakan kawasan yang strategis; (3) Jepang agar bersedia membangun kembali Indocina setelah masalah Kamboja diselesaikan.

Sementara itu Dr. Takahashi mengatakan: (1) hubungan Jepang dengan Asia Tenggara sebagai perkawinan yang memerlukan kerjasama untuk menghadapi tantangan masa depan; (2) sudah tiba waktunya bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk lebih agresif dalam pasaran dunia dan tidak menunggu sampai Jepang berbuat sesuatu lebih dahulu; (3) 70% dari US\$10 milyar bantuan luar negeri Jepang telah diberikan kepada Asia. Jumlah ini merupakan yang terbesar sejak tahun 1975 (*Antara*, 18 Juni 1989).

VI. ICK BELUM BERHASIL MENYELESAIKAN KONFLIK KAMBOJA

Konperensi Internasional tentang Kamboja (*International Conference on Cambodia* atau ICC, yang juga dikenal dengan ICK) berlangsung di Paris tanggal 30 Juli - 30 Agustus 1989 untuk membantu menyelesaikan konflik Kamboja secara menyeluruh. Konperensi yang diprakarsai oleh Perancis itu diketuai oleh Perancis bersama Indonesia dan dihadiri oleh delegasi Anggota Tetap DK PBB (AS, Uni Soviet, Perancis, Inggris, dan RRC) yang dipimpin oleh Menlu masing-masing, 6 negara ASEAN yang juga dipimpin oleh Menlu masing-masing, Jepang, India, Australia, Kanada, Vietnam, Laos, Zimbabwe selaku Ketua GNB dan Sekjen PBB serta wakil-wakil faksi-faksi Kamboja yang bertikai (Republik Khmer dipimpin oleh Heng Samrin dan Hun Sen, dan CGDK yang dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk).

ICK ini didahului dengan pertemuan antara Pangeran Norodom Sihanouk dan PM Republik Khmer, Hun

Sen, di Paris tanggal 24 Juli 1989.

Konperensi ini merupakan konperensi perdamaian Indocina yang terbesar setelah Perang Dunia II.

Beberapa saat sebelum ICK dibuka, pemerintah Phnom Penh mengumumkan penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Sejak bulan Mei sampai dengan Juli 1989, pasukan yang telah ditarik dari Kamboja mencapai 24.000 orang, dan sisanya sekitar 26.000 orang akan ditarik sekitar tanggal 21-26 September 1989 (*Antara*, 31 Juli 1989).

Menlu Perancis mengatakan pada pembukaan konperensi itu bahwa: (1) Khmer Merah perlu diikutsertakan dalam pemerintahan Kamboja di masa depan agar perang yang berkelanjutan itu dapat diakhiri; (2) seandainya ICK perlu disusul dengan pertemuan tingkat menteri; (3) penarikan pasukan Vietnam merupakan salah satu syarat tercapainya perdamaian di Kamboja, di samping perlunya rekonsiliasi antar keempat faksi Kamboja yang bertikai itu, adanya mekanisme pengawasan internasional yang kuat dan dapat diandalkan untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam itu, gencatan senjata serta pemilihan umum di Kamboja; (4) Perancis memuji peranan Indonesia yang telah berhasil menyelenggarakan JIM I dan JIM II (*Antara*, 31 Juli 1989).

Pada kesempatan itu, Menlu Ali Alatas menekankan pentingnya penyelesaian politik untuk menjadikan Kamboja suatu negara yang netral, damai, bebas dan non-blok serta tidak merupakan ancaman bagi negara-negara tetangganya. Konflik Kamboja yang telah berlangsung selama 11 tahun merupakan suatu persoalan yang rumit, oleh sebab itu perlu penyelesaian yang menyeluruh. Untuk itulah ASEAN membantu mengatasinya melalui dialog-dialog, baik melalui JIM I maupun JIM II (*Antara*, 31 Juli 1989).

Seperti halnya Menlu Ali Alatas, Sekjen PBB Peres de Cuellar menekankan perlunya penyelesaian yang menyeluruh atas konflik Kamboja dan meminta keempat Kamboja untuk membantu tugas ICM. Di samping itu dia mengusulkan agar misi pencari fakta mengunjungi Kamboja untuk membantu tugas ICM (*Antara*, 21 Juli 1989).

Pada tanggal 1 Agustus 1989, konperensi tingkat Menlu ini berakhir dan berhasil mencapai kesepakatan mengenai suatu rencana kerja untuk mengusahakan penyelesaian politik di Kamboja. Sehubungan dengan hal ini, dibentuklah tiga komite kerja dan sebuah panitia ad

hoc untuk merumuskan persetujuan menyeluruh yang mencakup: (1) penarikan mundur pasukan Vietnam di bawah pengawasan internasional; (2) jaminan internasional bagi kemerdekaan dan netralitas Kamboja; (3) pembentukan pemerintahan koalisi sementara berdasarkan rekonsiliasi nasional; (4) pemilihan umum yang bebas; (5) pemulangan para pengungsi; serta (6) pembangunan kembali Kamboja. Di samping itu juga disepakati untuk segera mengirim sebuah misi pengumpul fakta ke Kamboja untuk mengumpulkan keterangan-keterangan teknis di seluruh Vietnam guna membantu komite kerja merumuskan bentuk maupun pekerjaan ICM (*Kompas*, 2 Agustus 1989).

Namun demikian Menlu Perancis, Roland Dumas, menegaskan bahwa pengiriman misi PBB itu tidak berarti bahwa mekanisme kontrol internasional itu harus berbentuk pasukan perdamaian PBB. Vietnam menghendaki mekanisme kontrol internasional itu terdiri dari sebuah komisi 6 negara (di antaranya terdiri atas India, Indonesia, Polandia, Kuba dan Australia), sementara negara-negara yang lain menghendaki pasukan penjaga perdamaian PBB (*Kompas*, 2 Agustus 1989).

Kesepakatan itu nyaris gagal karena Khmer Merah sebelumnya menyatakan keberatan.

Komite Kerja Pertama bertugas membahas landasan dasar penghentian pertempuran, mandat dan prinsip-prinsip pembentukan serta pengoperasian ICM untuk mengawasi pelaksanaan penyelesaian konflik Kamboja secara menyeluruh. Komite ini diketuai bersama oleh Kanada dan India.

Komite Kerja Kedua bertugas merumuskan komitmen mengenai langkah-langkah ICK untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, netralitas dan integritas Kamboja, serta menjamin penghentian dan tidak terjadinya campur-tangan asing lagi. Komite ini diketuai bersama oleh Malaysia dan Laos.

Sedangkan Komite Kerja Ketiga bertugas merumuskan usaha-usaha untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan para pengungsi dan orang-orang yang terusir dari Kamboja untuk kembali ke negaranya serta mempersiapkan program-program pokok internasional untuk membangun perekonomian Kamboja. Ketua bersama komite ini adalah Australia dan Jepang.

Sementara itu, Komite ad hoc bertugas membahas soal-soal yang berkaitan dengan pelaksanaan rujukan nasional dan pembentukan pemerintahan peralihan

quadripartite di bawah pimpinan Pangeran Norodom Sihanouk. Komite ini bertugas juga untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Sedangkan keanggotaan komite ini terdiri atas keempat faksi Kamboja dan Ketua Bersama ICK.

Keempat Komite ini akan bersidang sampai tanggal 24 Agustus 1989, dan pada tanggal 24-26 Agustus 1989 Komite Koordinasi akan melakukan sidangnya, sehingga pada tanggal 28 Agustus Sidang Tingkat Menteri tahap kedua dapat dimulai (*Antara*, 2 Agustus 1989).

Pada tanggal 19 Agustus 1989, dalam rangka mendobrak kemacetan mengenai pembentukan pemerintahan sementara di Kamboja, Perancis mengusulkan untuk membentuk pemerintahan dua tingkat dengan Pangeran Norodom Sihanouk sebagai Kepala Negara dan Hun Sen tetap sebagai Perdana Menteri. Dalam pemerintahan dua tingkat ini, Khmer Merah diikutsertakan di dalam Dewan Negara. Tetapi usul Perancis itu ditolak oleh keempat faksi Kamboja.

Pada tanggal 23 Agustus 1989, misi teknis PBB melaporkan hasil penjakannya kepada konperensi. Kesimpulan yang dihasilkan adalah keadaan di Kamboja sedemikian parahnyanya, sehingga setiap tim peninjau internasional yang akan datang ke Kamboja harus dapat berdikari di bidang logistik.

Pada tanggal 25 Agustus 1989, komite-komite yang dibentuk itu menyerahkan hasil kerjanya kepada koor-

dinasi yang terdiri dari kedua Ketua Konperensi (Perancis dan Indonesia).

Pada tanggal 28 Agustus 1989, Sidang Tingkat Menteri Tahap Kedua dimulai. Tetapi AS, Uni Soviet, RRC dan Inggris tidak mengirimkan Menteri Luar Negerinya. Atas dasar pembicaraan dalam sidang ini, kedua ketua konperensi menilai adanya perbedaan pandangan yang tajam antara kelompok-kelompok Kamboja yang bertikai, khususnya mengenai masalah-masalah pokok yang sentral.

Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1989 diputuskan bahwa konperensi ini diskors sampai waktu yang belum ditentukan, karena masih belum mungkin mencapai penyelesaian konflik Kamboja secara menyeluruh, meskipun diakui adanya kemajuan untuk menjabarkan berbagai unsur yang diperlukan untuk mencapai penyelesaian konflik itu.

Sehubungan dengan hal itu, konperensi menghimbau semua pihak, khususnya keempat faksi Kamboja yang bersengketa, untuk meningkatkan usaha guna mencapai penyelesaian menyeluruh. Kedua ketua konperensi juga mendapat mandat untuk mendorong usaha-usaha itu, termasuk memanggil komite-komite kerja untuk mulai bersidang lagi. Diharapkan dalam jangka waktu 6 bulan, kedua ketua konperensi itu telah mulai mengadakan konsultasi dengan semua peserta untuk menentukan waktu yang terbaik guna memulai konperensi lagi (*Kompas*, 1 September 1989).

Para Penulis



- **BANDORO, Bantarto,**
Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional Publik, Universitas Indonesia, 1978; MA dalam Hubungan Internasional dari International University of Japan, Graduate School of International Relations, 1986; sejak 1980 menjadi anggota Departemen Hubungan Internasional (HI) CSIS, peneliti dan pengamat masalah Asia Timur, khususnya Jepang dan hubungannya dengan Amerika Serikat.
- **DIPOYUDO, Kirdi,**
Gelar Doktor dari Universitas Urbaniana, Roma (1961). Spesialisasinya adalah filsafat sosial. Mulai tahun 1972 menjadi staf peneliti CSIS, anggota Departemen Hubungan Internasional CSIS, mengamati masalah-masalah internasional termasuk kawasan Afrika dan Timur Tengah serta masalah-masalah yang berhubungan dengan filsafat sosial. Editor *Analisa* (1976-1984), Editor *The Indonesian Quarterly* (1984-1988), Ketua Departemen Hubungan Internasional (1979-1983).
- **KAMALUDDIN, Rustian,**
Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.
- **LUHULIMA, C.P.F.,**
Berijazah Sarjana Muda, Fakultas Sastra Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, tahun 1957. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Muenster, Westf dan berhasil meraih gelar Magister Artium (MA) dan Philosophy Doctor (Ph.D) dalam bidang filsafat. Sejak Juli 1964 menjadi Staf Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik dan Kewilayahan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Puslitbangpolwil-LIPI (sebelumnya bernama Lembaga Riset dan Kebudayaan Nasional LIPI/LRKN-LIPI). Tahun 1971-1980 menduduki jabatan Sekretaris LRKN-LIPI; kemudian tahun 1980-1984 sebagai Direktur bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Sekretariat Nasional ASEAN. Kini Staf Peneliti Utama Puslitbangpolwil-LIPI, pengamat dan peneliti kawasan Euro-Amerika.

- **SOEKITO, Wiratmo,**
Kolumnis berbagai surat kabar di bidang politik dan kebudayaan (1966 - sekarang); dosen LPKJ/IKJ (1977 - sekarang); komentator politik dalam dan luar negeri TVRI (1966-1969) dan RRI (1966-1972). Belajar pada Universitas Katolik Nijmegen, Belanda, Jurusan Studi Filsafat (1954-1955).

- **WANANDI, Jusuf,**
Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta (1960). Pada tahun 1964 menjadi dosen di fakultas dan universitas yang sama. Tahun 1977: Congressional Fellow yang disponsori oleh American Political Science Association (APSA). Kini Ketua Dewan Penyantun dan Anggota Dewan Direktur CSIS; Anggota, Board of Governors, East-West Center, Honolulu; Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Kerjasama Ekonomi Pasifik.

| | |
|------------------|---|
| Naskah | Naskah-naskah untuk ANALISIS hendaknya diketik dengan jarak dua spasi, sepanjang 20-30 halaman kuarto, termasuk referensi dalam bentuk catatan kaki dan/atau daftar bacaan. Pengiriman naskah hendaknya disertai nama lengkap dan alamat penulis yang jelas. Untuk tulisan-tulisan yang dimuat akan disediakan honoraria yang pantas. Naskah-naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis jika hal itu dikehendakinya. Surat menyurat yang berhubungan dengan hal tersebut harap ditujukan ke Redaksi ANALISIS CSIS. |
| Langganan | Harga pengganti ongkos cetak Rp 3.000,00 per eksemplar; langganan setahun (6 nomor, sudah termasuk ongkos kirim biasa) Rp 15.000,00. Surat menyurat yang berhubungan dengan langganan ditujukan ke Biro Pemasaran, CSIS. |
| Alamat | Jalan Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160, Telepon 356532, 356533, 356534, 356535. |

